EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM MEMBANTU PEREKONOMIAN MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Starta Satu (S1) dalam Ilmu Ekonomi Islam

Disusun Oleh :

Nuriya Ulfi

NIM 1405026146

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Nuriya Ulfi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamualaikum wr. wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing memyatakan menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama	: Nuriya Ulfi
NIM	: 1405026146
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: **"Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi di Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur)"**

Dengan ini kami setujui, dan mohon kiranya agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang, 23 Desember 2021

Pembimbing 1

H. Ade Yusuf Mujaddid,M.Ag.,
NIP: 19690120 199403 1 004

Pembimbing II

H. Nurudin, SE., MM
NIP: 19900523 201503 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Raya Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nuriya Ulfi
NIM : 1405026146
Judul : EVEKTIVIT PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM MEMBANTU PEREKONOMIAN MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 30 desember 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun Akademik 2021/2022.

Semarang, 6 Januari 2021

Ketua Sidang

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag
NIP. 19730811 200003 1 004

Sekretaris Sidang

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag
NIP. 1670119 199803 1 002

Penguji I

Sokhikhatul Mawadah, M.E.I
NIP. 19850327 201801 2 001

Penguji II

Faris Shalahuddin Zakiy, SE., M.E
NIP. 199002272019031012

Pembimbing I

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag
NIP. 1670119 199803 1 002

Pembimbing II

Nurudin, S.E., M.M.
NIP. 19900523 201503 1 004

MOTTO

* ¨bÎ) ©!$# öNä.ã⍰ãBù't⍰ br& (#r⍰⍰xsè? ÏM»uZ»tBF{$# #⍰n<Î) $ygÎ=÷dr& #s⍰Î)ur OçFôJs3ym tû÷üt/ Ä¨$¨Z9$# br& (#qßJä3øtrB ÉAô⍰yèø9$$Î/ 4 ¨bÎ) ©!$# $KÏèÏR /ä3ÝàÏèt⍰ ÿ¾ÏmÎ/ 3 ¨bÎ) ©!$# tb%x. $Jè⍰ÏÿÿX⍰ #Z⍰⍰ÅÁt/ ÇÎÑÈ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (QS.An-Nisa: 58)

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur dan kerendahan hati atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yaitu satu-satunya nabi yang dapat memberikan syafaat untuk umat yang beriman. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Nastangin dan Ibu Suliyah, serta kakak-kakak M.Farizal Anas, Estik Nurjanah dan adik M.Faisal Arbi yang sudah memberikan banyak dukungan dan semangat tiada hentinya serta telah memberikan sejuta untaian doa dan motivasi sehingga diberi kelancaran ketika mengejarkan Skripsi sampai dengan selesai.
2. Almamater saya Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
3. Teman-teman angkatan 2014 semester akhir yang selama ini telah berjuang menuntut ilmu bersama-sama dan selalu memberi dukungan.
4. Teman-teman UKM Teater KOIN yang selama ini memberikan semangat ketika berkegiatan bersama.
5. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu serta mendoakan penulisan dalam tercapainya skripsi ini.

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nuriya Ulfi

NIM : 1405026146

Jurusan : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Efektifitas Program Bantuan Sosial Tunai dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Terdampak Pandemi Covid 19 Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur)

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi sedikitpun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Desember 2021

Deklarator

Nuriya Ulfi

1405026146

PEDOMAN TRANSLITERASI

HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi termasuk hal yang penting dalam penulisan skripsi karena pada umunya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab haru disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan suatu pedoman transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ى = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

-َ = a

-ِ = i

-ُ = u

C. Diftong

اَيْ = ay

اَوْ = aw

D. Syaddah (ّ-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطبّ (*al-thibb).*

E. Kata Sandang (ال...)

Kata sandang (ال...) ditulis dengan *al-*... misalnya الصناعة = *al-shina ah. Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F.Ta Marbuthah (ة)

Setiap *ta marbuthah* ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-maisyah al-thabiiyyah.*

ABSTRAK

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dunia saat ini. Dalam waktu yang relatif singkat, virus ini telah mengubah drastis arah pembangunan global dari optimisme pemulihan ekonomi yang di awal 2020 diyakini masih akan terjadi, sampai menjadi ancaman krisis kesehatan serta resesi yang tak terhindarkan. Oleh sebab itu pemerintah menggelontorkan berbagai sekema bantuan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Banyak program inovatif yang telah disiapkan dan dilaksanakan, salah satunya adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan Sosial Tunai (BST) DKI berbeda dengan Bantuan Sosial Tunai pusat, karena bantuan tersebut bersumber dari dana APBD DKI Jakarta. Penelitian ini fokus untuk menilai Efektivitas dari program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Kelapa Dua Wetan menurut Prespektif Ekonomi Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian field research (penelitian lapangan). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder, dimana pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif dari data-data yang dikumpulkan selama penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaksanaan program BST di Kelurahan Kelapa Dua Wetan sudah efektif atau sesuai dengan indikator efektivitas yang digunakan, yaitu tercapainya tujuan, terlaksananya proses integrasi, serta adanya adaptasi di masyarakat. Namun bantuan tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama sebulan penuh, tetapi masyarakat juga tidak cenderung pasif atau hanya mengandalkan bantuan tersebut. Dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggung jawab, dan *tafakul* (Jaminan Sosial), implementasinya pada program Bantuan Sosial Tunai ini telah memenuhi nilai-nilai tersebut. Seperti diterapkannya nilai keadilan, tanggung jawab, dan juga *Tafakul* (jaminan sosial), namun pemerintah juga perlu meningkatkan program tersebut agar nilai keadilan terpenuhi sepenuhnya.

Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Bantuan Sosial Tunai, Efektivitas

ABSTRACT

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) has become the toughest challenge for the social, economic and welfare development of the world today. In a relatively short period of time, this virus has drastically changed the direction of global development from optimism that the economic recovery in early 2020 was believed to still occur, to the threat of a health crisis and an unavoidable recession. Therefore, the government has launched various aid schemes to help people affected by the Covid-19 pandemic. Many innovative programs have been prepared and implemented, one of which is Cash Social Assistance (BST) which is intended for underprivileged communities affected by the Covid-19 pandemic. The DKI Cash Social Assistance (BST) is different from the Central Cash Social Assistance, because the assistance comes from DKI Jakarta APBD funds. This study focuses on assessing the effectiveness of the Cash Social Assistance (BST) program in Kelapa Dua Wetan Village according to the Islamic Economic Perspective.

This type of research is a field research research (field research). This research is a descriptive qualitative research. Sources of data in this study in the form of primary and secondary data, where data collection using interview techniques, observation and documentation. To analyze the data, the authors used descriptive analysis of the data collected during the study.

Based on the results of research in the field, the implementation of the BST program in Kelapa Dua Wetan Village has been effective or in accordance with the effectiveness indicators used, namely the achievement of goals, implementation of the integration process, and adaptation in the community. However, the assistance was not sufficient to meet the basic needs of the community for a full month, but the community also did not tend to be passive or only rely on the assistance. Judging from the values of Islamic Economics, namely justice, responsibility, and tafakul (Social Security), its implementation in the Cash Social Assistance program has fulfilled these values. Such as the implementation of the values of justice, responsibility, and also Tafakul (social security), but the government also needs to improve the program so that the value of justice is fully fulfilled.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Cash Social Assistance, Effectiveness

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Bissmillahirrohmanirrohim

Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan baik jasmani dan rohani, penulis mampu menyelesaikan sebuah karya tulis ilmiah (Skripsi) ini. Tidak ketinggalan sholawat serta salam tiada henti-hentinya selalutercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa membimbing dan menujukkan jalan yang benar bagi umatnya.

Skripsi ini dibuat guna memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi Sarjana/S1 Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, sebagai penulis yang belum pernah menyusun karya tulis ilmiah seperti ini, tentunya tidak akan mudah untuk menulis sebuah skripsi yang bermutu tinggi oleh karenanya dengan rendah hati penulis akan menyajikan sebuah karya tulis ilmiah atau skripsi dengan judul "Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi di Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur ".

Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bimbingan, pengarahan, dukungan, dan dorongan semangat dari berbagai pihak yang turut serta dalam membantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Program Studi S1 Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A. selaku wali studi.
5. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., dan Nurudin, SE., MM selaku dosen pembimbing.
6. Bapak ibu Dosen dan semua jajaran Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terkhusus Program Studi S1 Ekonomi Islam.
7. Kedua orang tua, sanak dan keluarga, sahabat yang telah memberikan kasih sayang, dan dukungan baik moril maupun materiil, serta doa kepada penulis.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmat-Nya kepada semua pihak atas segala budi baik dan jasanya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis hanya bisa berharap semoga karya tulis ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca serta berguna bagi pendidikan, khususnya di bidang ekonomi.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 21 Desember 2021

Penulis

Nuriya Ulfi

NIM. 1405026146

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

DEKLARASI..... **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vii**

ABSTRAK ..... **ix**

KATA PENGANTAR..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

DAFTAR TABEL ..... **xvi**

BAB I : PENDAHULUAN

A. .....Latar Belakang 1

B. .....Rumusan Masalah 8

C. .....Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 9

D. .....Tinjauan Pustaka 10

E. .....Sistematika Penulisan 15

BAB II : LANDASAN TEORI

A. .....Krisis Ekonomi 16
1. .....Konsep Krisis Ekonomi 16
2. .....Krisis Ekonomi Indonesia Pada Masa Pandemi 29
B. .....Kemiskinan.....21
1. .....Pengertian Kemiskinan 21
2. .....Bentuk dan Jenis Kemiskinan 23
3. .....Pengentasan Kemiskinan 24
4. .....Pengentasan Kemiskinan di Masa Pandemi 25
5. .....Kemiskinan Dalam Prespektif Islam.....27
6. .....Pengentasan Kemiskinan Dalam Prespektif Islam 31
C. Efektivitas35
1. .....Pengertian Efektivitas 35
2. .....Ukuran Efektivitas 36
D. .....Bantuan Sosial Tunai 38

1. .....Pengertian Bantuan Sosial Tunai 38
2. .....Bentuk Bantuan 38
3. .....Dasar Hukum Bantuan Sosial Tunai 39
4. .....Syarat-syarat Peneriman BST.....40
5. .....Mekanisme pendistribusian BST.....40
E. ..... Kesejahteraan Masyarakat 42
1. .....Pengertian42
2. .....Indikator42
3. .....Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam 46

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian 51
1. .....Jenis dan Pendekatan Penelitian 52
2. .....Lokasi Penelitian.....52
3. .....Sumber data.....53
4. .....Metode Pengumpulan Data 53
5. .....Metode Analisis Data.....54

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ..... Gambaran Umum Kelurahan Kelapa Dua Wetan 56
1. .....Letak Geografis Wilayah 56
2. .....Luas Wilayah.....56
3. .....Lembaga Pemerintahan 57
4. .....Kondisi Penduduk 58
5. .....Rukun Tetangga dan Rukun Warga 63
6. .....Sarana dan Prasarana.....63
B. .....Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahn Kelapa Dua Wetan 65
C. .....Krisis Ekonomi Warga Kelurahan Kelapa Dua Wetan.....65
D. .....Peran Pemerintah Mengatasi Krisis.....68
E. .....Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Kelapa Dua Wetan 70
F. .....Analisis Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Kelapa Dua Wetan 77
G. .....Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Kelapa

Dua Wetan Menurut Prespektif Ekonomi Islam.....80

BAB V : PENUTUP

A. .....Kesimpulan.....85

B. Saran87

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 Daftar Jabatan Perangkat Kelurahan..... 53

TABEL 3.2 Daftar Jabatan Penempatan Pada Jabatan Sektoral..... 53

TABEL 3.3 Daftar Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 54

TABEL 3.4 Daftar Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 55

TABEL 3.5 Daftar Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian..... 55

TABEL 3.6 Daftar Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 58

TABEL 3.7 Daftra RT dan Rw..... 58

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dunia saat ini. Dalam waktu yang relatif singkat, virus ini telah mengubah drastis arah pembangunan global dari optimisme pemulihan ekonomi yang di awal 2020 diyakini masih akan terjadi, menjadi ancaman krisis kesehatan serta resesi yang tak terhindarkan. Menurut World Health Organization (WHO), Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV- 2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2) yang menyerang sistem pernapasan. Namun tingkat penularan yang sangat cepat serta belum ditemukannya vaksin atas penyakit tersebut membuat Covid-19 memberikan ancaman serius pada kesehatan publik, terutama terlihat dari tingkat kematian yang terus meningkat. Penyebaran Covid-19 mulai terdeteksi pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, pada akhir Desember 2019. Sejak bulan Januari 2020, kasus Covid-19 mulai menunjukkan kenaikan dan penyebarannya mulai meluas tidak hanya di Wuhan, Hubei, tetapi juga di 25 provinsi di Tiongkok dan 4 negara lain (Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat).[1]

Pada tanggal 11 Maret 2020, organisasi kesehatan dunia atau WHO (*World Health Organization*) menyatakan wabah penyakit akibat virus corona Covid-19 sebagai pandemi global. Dinyatakannya status ini diakibatkan kasus positif di luar China yang meningkat tiga belas kali lipat di 114 negara dengan total kematian pada saat itu mencapai 4,291 orang. WHO menyatakan bahwa selama ini belum pernah ada pandemi yang dipicu oleh virus corona dan pada saat yang bersamaan, belum pernah ada pandemi yang dapat dikendalikan. Atas dasar itu, maka WHO meminta negara-negara untuk mengambil tindakan yang mendesak dan agresif untuk mencegah dan mengatasi penyebaran virus Covid-

[1]Badan Kebijakan Fiskal.2021. *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021"Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi".* Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta. hal 1-2

19 ini (WHO 2020).[2]Ditetapkannya Virus Corona sebagai pandemi sendiri bukan tanpa sebab. WHO menilai tingkat penyebaran penyakit baru ini di seluruh dunia telah mempengaruhi banyak orang dan belum satupun negara menunjukkan tanda-tanda terlepas dari jeratannya. “Istilah pandemi sendiri berasal dari bahasa Yunani “pan” yang artinya semua dan “demos” yang artinya orang. Ini merupakan epidemic penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia”.[3]

Kasus Covid 19 di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020, dimana dua orang warga negara Indonesia seorang ibu berumur 64 tahun dan putrinya berumur 31 tahun diduga tertular karena kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Sejak kasus pertama diumumkan bulan Maret lalu, lonjakan pasien positif terus terjadi di Indonesia dan jumlah kasus yang terjadi semakin meningkat.Pada Bulan April 2020, Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional non alam oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam penetapan Keppres poin ketiga diatur bahwa Gubenur, Bupati, dan Walikota sebagai sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Dengan ditetapkannya status bencana nasional non alam, Pemerintah Indonesia mengakui bahwa Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, berdasarkan laporan dari Satgas Covid 19 per tanggal 20 November 2020 Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah kasus terbanyak di Indonesia dengan presentase sebesar 25,4% diikuti Jawa Timur dengan presentase sebesar 11,9%, dan Jawa Barat sebesar 9,6%. Tingginya

---

[2] Anggia Valerisha dan Marshell Adi Putra, *Pandemi Global COVID-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital?*, jurnal penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNPAR 2020, hal 1-2

[3]https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/virus-corona-jadi-pandemi-global-apa-sih-pengertian-pandemi-3854/, diakses 5 Oktober 2021 pukul 01.28 WIB

kasus yang terjadi di DKI Jakarta, menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi penyumbang terbanyak atas kasus konfirmasi positif Covid 19 di Indonesia. Merespon banyaknya kasus yang terjadi di DKI Jakarta, Pemerintah DKI Jakarta melalui Gubernur Anies Baswedan membentuk beberapa kebijakan publik seperti penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penetapan beberapa kebijakan lainnya seperti himbauan beraktivitas dari rumah, meniadakan salat Jumat atau ibadah lainnya, penundaan resepsi pernikahan, dan juga pelarangan warga ke luar Jakarta. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan diharapkan dapat menekan angka persebaran Covid 19 di Jakarta.[4]

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia untuk meminimalisir angka kasus positif Covid-19 ini yakni dengan cara penerapan physical distancing, work form home (WFH), penggantian kegiatan belajar mengajar dari tatap muka menjadi daring kepada seluruh tingkat pendidikan baik formal maupun non formal, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan berbagai upaya lainnya. Upaya-upaya tersebut terus diterapkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali meski pada akhirnya terjadi penurunan perekonomian. Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2020 mengalami keterlambatan dibanding triwulan I-2019 yakni dari 5,07 persen menjadi 2,97 persen. Selain penurunan ekonomi juga banyak pekerja yang di PHK, usaha-usaha yang terpaksa gulung tikar, penurunan penghasilan bagi para pedagang, ojek online, supir angkutan umum dan lain sebagainya. Semua lapisan masyarakat mengalami kerugian tersebut.[5]

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode Agustus 2020, jumlah angka pengangguran meningkat 2,67 juta orang. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi 9,77

---

[4]Meilinda Triana Pangaribuan dan Adis Imam Munandar, *Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi Covid-19*, Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia, Volume 14, Nomor 1, Januari 2021, hal 2

[5]Fatkhul Khoiriyah, dkk, *Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro*, Jurnal penelitian Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Spirit Publik Volume 15, Nomor 2, 2020, hal 98

juta orang.Tingkat pengangguran terbuka Provinsi DKI Jakarta pada Agustus 2020 sebesar 10,95 persen atau setara 572.780 orang. Bila dibandingkan dengan keadaan Agustus tahun lalu, pengangguran DKI Jakarta naik 4,41 persen atau bertambah 233.378 orang. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab kenaikan tingkat pengangguran di Ibu Kota. Sebanyak 175.890 pengangguran disebabkan karena Covid-19. Mereka berhenti bekerja karena perusahaannya terdampak Covid-19 atau pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).[6]

Peningkatan jumlah pengangguran pun turut membuat jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan. Data BPS menunjukkan, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 27,55 juta orang pada September 2020. Jumlah tersebut meningkat 2,76 juta dibandingkan posisi September 2019. Angka tersebut membuat kemiskinan Indonesia kembali ke level 10 persen dari jumlah penduduk, yakni sebesar 10,19 persen. Dengan demikian, tren penurunan angka kemiskinan yang terjadi hingga tahun 2019 pun terhenti. Sebab, dampak pandemi mulai terasa pada kuartal I-2020. Persentase penduduk miskin naik menjadi 9,78 persen, atau naik 0,37 persen dari Maret 2019.[7]

Negara harus mengambil alih tanggung jawab dan mengorganisasi secara nasional atau memberikan jaminan secara kolektif kepada seluruh masyarakat dalam bentuk jaminan sosial untuk menghindari konflik dan untuk memberikan efisiensi masyarakat yang lebih baik. Islam memandang, bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif dari serangan luar. Tetapi pertanggung jawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal, makmur dan adil. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang

---

[6]https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/493/dampak-covid-19--pengangguran-dki-jakarta-tembus-dua-digit.html , (diakses pada, 10 Oktober 2021, pukul 20.00 WIB)

[7]https://money.kompas.com/read/2021/03/02/161627926/satu-tahun-pandemi-jumlah-pengangguran-nyaris-10-juta-angka-kemiskinan-tembus?page=all#page2 , (diakses pada, 10 Oktober 2021, pukul 20.35 WIB)

lemah dan memberikan jaminan sosial kepada mereka, termasuk yang menyangkut masalah perekonomian.[8]

Islam menganjurkan adanya persediaan kebutuhan pokok. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan sumber kehidupan bagi setiap penduduk negeri demi terciptanya keadilan sosial. Bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah agar dipergunkan sebaik-baiknya bagi kesejjahteraan bersama, oleh karena itulah di dalam Al-Quran dalil yang menunjukan tugas kekhalifahan atau pemeritah secara umum adalah untuk menwujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama sebagaimana firman Allah SWT:

uqèdur “Ï%©!$# öNàn=yèy_ y#Í´¯»n=yz ÇÚö□F{$# yìùu□ur öNä3□Ò÷èt/ s-öqsù <Ù÷èt/ ;M»y_u□y□ öNä.uqè=ö7u□Ïj9 □Îû !$tB /ä38s?#uä 3 ¨bÎ) y7/u□ ßì□Î□| É>$s)Ïèø9$# ¼çm¯RÎ)ur Ö□qàÿtós9 7LìÏm§□ ÇÊÏÎÈ

Artinya: *“Dan dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi dan dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain utuk mengujimu atas (karunia) yang diberikanNya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberikan hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”* (Q.S Al-Anam 165).[9]

Sebagai usaha dalam menangani dampak dari pandemi Covid-19 dalam sektor ekonomi, Pemerintah Indonesia menyiapkan dana untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 khususnya masyarakat menengah ke bawah.Pemerintah menggelontorkan berbagai skema bantuan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Banyak program inovatif yang telah disiapkan dan dilaksanan oleh pemerintah untuk memberikan solusi atas permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat Indonesia yaitu pandemi Covid-19. Masalah mendasar selama pandemiCovid-19 ini adalah

[8]Akhmad Mujahidin, *“Ekonomi Islam”*,(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal.117 .

[9] Ade Irma Suryani, “ *Peranan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Sarik Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar ”*, Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim RIAU Pekan Baru, 2010, hal.5

kesejahteraan sosial, sehingga pemerintah hadir dengan berbagai program yang mencoba menyentuh langsung kepada masyarakat sebagai jawaban atas permasalahan mendasar tersebut. Keseriusan pemerintah ini bisa kita lihat dari lahirnya begitu banyak program yang secara khusus dikeluarkan untuk mengatasi masalah sosial akibat pandemi Covid-19. Pemerintah mengalokasikan Dana sebesar Rp.695,2 triliun dalam menangani pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Dana itu dikucurkan untuk berbagai sektor, salah satunya untuk bansos sebesar Rp.203,9 triliun. Bantuan sosial yang dimaksud seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Santunan Kematian, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Sembako untuk meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi. Melalui berbagai proses dan perencanaan yang matang sehingga menjadi solusi permasalahan sosial-ekonomi masyarakat dan juga berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu Program Jaring Pengaman Sosial yaitu Program Bantuan Sosial Tunai (BST). Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang berupa uang dan diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan yang rentan terkena dampak akibat dari wabah Corona Virus Disaese 2019 (COVID-19). [10]

Bantuan Sosial Tunai atau BST adalah bantuan sosial berupa uang tunai yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar. BST Pemprov DKI Jakarta tentunya berbeda dengan BST Pemerintah Pusat atau yang dikenal dengan BST Kemensos. BST Kemensos disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui PT Pos Indonesia (Persero), dengan anggaran yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial RI. Sedangkan, BST Pemprov DKI Jakarta disalurkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui rekening penerima BST di Bank DKI dengan anggaran yang bersumber dari APBD DKI Jakarta. Penerima BST merupakan keluarga penerima Bantuan Sosial Sembako Tahun 2020 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

[10] Melati dan Zulkarnaini, *"EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN PASIR PENGARAIAN"* Journal Publicuho Volume 4, No 1 (February-April), (2021), Hal 20.

Provinsi DKI Jakarta yang telah diperbarui dan disepadankan. Penerima BST bukanlah termasuk penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dana BST yang diberikan kepada penerima bansos tunai sebesar Rp300 ribu per kepala keluarga tiap bulan. Bantuan tersebut akan diberikan selama 4 bulan dari Januari hingga April 2021 melalui rekening Bank DKI penerima bansos tunai. Bagi masyarakat yang terdaftar sebagai penerima BST dari Pemprov DKI Jakarta, akan mendapat undangan terkait jadwal serta lokasi pendistribusian BST.[11]

Tujuan dilaksanakannya program tersebut adalah untuk menjaga daya beli dan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemiCOVID-19. Namun, kehadiran program tersebut menuai banyak problematika, seperti banyaknya masyarakat yang mengeluhkanbelum tepatnya sasaran penerima bantuan, pemberian atau penyaluran dana yang tidak tepat waktu, dan adanya pemutusan penyaluran dana secara sepihak. Oleh sebab ituuntuk melihat indikator tercapainya tujuan dari program bansos tersebut dalam membantu perekonomian masyarakat rentan yang terdampak Covid-19 dapat diukur melalui efektivitas pelaksanaam program bansos tersebut. Pengukuran dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan yang sudah ditetapkan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Tindakan yang dilakukan harus tepat karena tujuan tidak akan tercapai atau dengan kata lain bantuan tidak efektif jika tindakan tersebut tidak tepat. Efektivitas diartikan sebagai suatu ukuran yang dapat menggambarkan sejauh mana target dapat tercapai. keefektifan suatu program dapat diamati dari indikator-indikator berupa ketepatan penentuan pilihan, waktu, tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas perilu dilakukan karena nantinya akan terlihat seberapa efektif bansos tersebut dalam

[11]Mike Nafisah, *Cek informasi Bantuan Sosial Tunai Jakarta di Sini*, https://smartcity.jakarta.go.id/blog/637/cek-informasi-bantuan-sosial-tunai-jakarta-di-sini , 11 Oktober 2021, Pukul 20.00 WIB.

memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat selama pandemi Covid-19 ini masih ada.[12]

Berlandaskan paparan permasalahan dalam program BST selama Covid-19 diatas, dapat diketahui bahwa supaya program ini bergerak optimal sesuai tujuan maka perlu adanya pengukuran efektivitas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang Bantuan Sosial selama masa pandemi Covid-19 ini khususnya di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, kecamatan Ciracas Jakarta Timur. Dalam hal ini, penulis mengangkat judul" **EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM MEMBANTU PEREKONOMIAN MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecanatan Ciracas Jakarta Timur)** ".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Krisis Perekonomian Warga Kelapa Dua Wetan di Masa Pandemi?
2. Bagaimana Peran Pemerintah dalam mengatasi Krisis Ekonomi di Masa Pandemi?
3. Bagaimana Efektivitas program Bantuan Sosial Tunai dalam membantu perekonomian masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Kelurahan Kelapa Dua Wetan?
4. Bagaimana Efektivitas program Bantuan Sosial Tunai dalam membantu perekonomian masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Kelurahan Kelapa Dua Wetan menurut prespektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

[12] Fatkhul Khoiriyah, Op.Cit. hal.100

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, tujuan yang ingin dicapai peneliti dari penelitian ini yaitu:

a. Untuk mengetahui bagaimana perekonomian masyarakat di Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur pada masa Pandemi
b. Untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam Mengatasi krisis ekonomi masyarakat Kelapa Dua Wetan Pada masa Pandemi.
c. Untuk mengetahu bagaimana Efektivitas pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai dalam membantu perekonomian masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur.
d. Untuk mengetahui Efektivitas pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai dalam membantu perekonomian masyarakat terdampak pandemic Covid-19 di Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur menurut prespektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, masyarakat maupun dari kalangan lainnya, antara lain:

a. Manfaat Teoritis
    1. Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan, Khususnya di bidang Ekonomi Islam.
    2. Bagi peneliti baru, diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah, diharapkan sebagai salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam hal pertimbangan dalam pengambil kebijakan menyangkut program-program pemerintah dalam membantu dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang ada di masyarakat.
2. Bagi masyarakat, diharapkan bisa menambah wawasaan dan pemahaman masyarakat mengenai program Bantuan Sosial Tunai (BST) dan mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi penuh dalam setiap program Pemarintah.

D. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi Nindya Cahya Rosadin, dengan judul **"Efektiitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Perumahan Taman Cikande, Jayanti Tanggerang".** Berdasarkan, Penjelasan yang telah peneliti uraikaan, maka dapat disimpulkan mengenai hasil penelitian efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial tunai pada masa pandemi Covid-19 di Perumahan Taman Cikande Jayanti-Tanggerang, tepatnya pada masa pandemi Covid-19. Peneliti menjabarkan kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :
   1) Analisis Hasil Mengenai Krisis ekonomi Yang Melenda Masyarakat Warga RT 02

      Selama masa pandemi Covid-19 ini, masyarakaat di Perumahan Taman Cikande tepatanya di lingkungan RTP2 RW 03 mengalami krisis ekonomi atau penurunan pendapatan.
   2) Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Krisis

      Pemerintah mengadakan berbagai macam bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdamak pandemi ini sebagai upaya dan bentuk partisipasi pemerintah guna membantu masyarakat yang terdampak pandemi ini agar mereka bisa tetap menjaga daya belinya.

3) Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Perumahan Taman Cikande, Jayanti-Tanggerang, berdasarkan indikator Efektivitas seperti Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi, sudah memenuhi indikator tersebut, dan dapat disimpulkan bahawa program tersebut telah efektif.
4) Bantuan Sosial Tunai Sebagai Sarana Pengembangan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwasannya pemberian Bantuan Sosial Tunai dapat menjadi saran bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki seperti membuka usaha baru yang mana modalnya diperoleh dari uang Bantuan Sosial Tunaai ini.[13]

2. Jurnal Penelitian Carly Erfly Fernando Maun, dengan judul **" Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dan Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Sulun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan"**, Jika dilihat efektifitasnya dari program tersebut terkait dengan ketepatan waktu penyaluran BLT Dana Desa di Desa Talaitad, dapat disimpulkan sudah tepat waktu dan mengikuti mekanisme yang ada. Sedangkan dari sisi ketepatan menentukan pilihan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur, mengenai adanya dugaan nepotisme dalam penentuan penerima BLT Dana Desa telah di bantah oleh hukum tua dan berdasarkan hasil data sekunder dilapangan menyatakan demikian. Dan untuk aspek ketepatatan sasaran, dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran sudah tepat sasaran. Hal tersebut didasari

[13]Nindya Cahya Rosadin, *"Efektiitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Perumahan Taman Cikande, Jayanti Tanggerang",* Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hal. 99-102.

oleh pernyataan masyarakat yang merasakan langsung dampak BLT dan merupakan pelaku langsung di lapangan.[14]

3. Jurnal penelitian Fatkhul Khoiriyah, Liana Oktavia, Nimatus Zakiyah dan Muhammad Afthon Ilman Huda, dengan judul **"Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakt Terdampak Covid-19 Di Desa Gondangarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro",** Desa Gedongarum menjadi salah satu desa di Indonesia yang mendapat berbagai bentuk bantuan sosial selama pandemi Covid-19. Beberapa bantuan tersebut berupa tunai yang disebut dengan BST dan BLT-Dana Desa. Adapun jumlah dari penerima kedua bantuan tersebut adalah 26 KK untuk BLT-Dana Desa dan 97 untuk BST. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa suatu pemerintahan dalam melaksanakan suatu programnya terutama dalam masalah pemberian bantuan sosial yang langsung ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan pasti terdapat kekurangan. Apalagi, ketika dalam masa pandemi Covid-19 seperti ini, yang mana tentunya semua masyarakat tanpa terkecuali merasa terdampak dan ketika terdapat salah satu masyarakat yang tidak mendapatkan BST/BLT-Dana Desa bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Dalam hal ini titik poin yang menjadi permasalahan dalam program BST dan BLT-Dana Desa di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro masih dirasa kurang efektif dalam hal kurangnya keakuratan data dan tidak tepat sasaran sebab tidak ada pembaharuan data. Oleh karena itu, perlunya suatu inisatif tersediri dari perangkat desa agar program bantuan sosial BST dan BLT-Dana Desa ini bisa lebih baik kedepannya. Maka perlu suatu adanya keefektivan pelaksanaan bantuan dalam suatu program

[14]Carly Erfly Fernando Maun, *" Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dan Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Sulun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan"*, Jurnal Penelitian, Jurnal Politico, Vol9, No2, (2020), hal.15.

yang mana bisa dinilai dengan seberapa jauh peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan diberlakukan program bantuan tersebut.[15]

4. Jurnal Penelitian Melati dan H. Zulkarnaini, dengan judul **"Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian"**, Berdasarkan hasil penelitian data dan pembahasan yang penulis paparkan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :
    1) Efektivitas pelaksanaan program BST dikelurahan pasir pengaraian kecamatan rambah kabupaten rokan hulu dapat disimpulkan belum efektif dilihat dalam setiap indikator efektivitas yaitu :
        a. Pada aspek ketepatan sasaran, terdapat keluarga penerima manfaat (KPM) yang masih tumpang tindih. Hal ini dibuktikan karena data awal yang menjadi acuan adalah data dari DTKS. Ini membuktikan bahwa tidak efektifnya pemilihan sasaran di kelurahan pasir pengaraian.
        b. Pada aspek sosialisasi program, terdapat beberapa aparat yang berperan dalam pelaksanaan program BST ini masih belum sepenuhnya memahami juknis yang telah diberikan, begitupun masyarakat tidak paham kenapa BST ini diberikan dan untuk apa.
        c. Pada aspek tujuan program, baik KPM maupun pihak pelaksana telah berusaha untuk mewujudkan tujuan program agar berjalan efektif. Namun pada kenyataannya hanya pihak pelaksana yang mengetahui tujuan dari program BST ini sedangkan KPM tidak peduli dan tidak tahu apa tujuan dari program BST tersebut.

[15]Fatkhul Khoiriyah,dkk, "*Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro",*Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Jurnal Penelitian Spirit Publik Vol.15, No. 2, 2020, hal. 108.

d. Pada aspek pemantauan program, hanya pihak kelurahan yang ikut campur sedangkan dari pihak dinas sosial sendiri tidak ikut andil dalam melakukan pemantauan program BST.

2) Faktor-faktor penghambat keefektifan pelaksanaan program BST pada masa pandemi Covid-19 di kelurahan pasir pengaraian kecamatan rambah kabupaten rokan hulu. Ada 2 faktor yaitu :

a. Faktor validasi data, terjadinya penghambat dalam faktor ini yaitu karena terdapat NIK yang tidak valid pada penyaluran BST.

b. Faktor program yang dikeluarkan secara mendadak yaitu ketidak pahaman masyarakat mengenai program BST dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat.[16]

Berdasarkan pada penelusuran penelitian diatas, penulis sama-sama ingin memfokuskan penelitian pada efeketifitas program bantuan yang diberikan pemerintah pada masa pandemi Covid-19, khususnya penelitian pada program Bantuan Sosial Tunai, dan penulis juga menambahkan kajian prespektif Ekonomi Islam yang akan membedakan pada penelitian sebelumnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mengarahkan dan menjelaskan secara garis besar dari masing-masing bab secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan dalam penyususnan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab, yaitu:

[16]Melati dan H. Zulkarnaini, dengan judul *"Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian"*, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Journal Publicuho Vol 4 No. 1 (February-April), (2021)pp.19-26, hal.25.

BAB I, Pendahuluan

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II, Landasann Teori

Bab ini akan menjelaskan teori — teori dan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai literatur yang sesuai dengan topik dari skripsi yang dapat membantu penulisan, yang terdiri dari krisis ekonomi , Kemiskinan, Teori Efektivitas, Bantuan Sosial Tunai, Kesejahteraan Masyarakat.

BAB III, Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang metodologi yang akan digunkan oleh penulis

BAB IV, Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil dan pembahasan penelitian.

BAB V, Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian skripsi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan saran — saran yang mendukung.

DAFTAR PUSTAKA,

Adalah daftar dari berbgai sumber referensi yang menjadi bahan dalam penelitian seperti buku — buku, jurnal ilmiah, majalah atau website dan lain sebagainya.

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Krisis Ekonomi

1. Konsep Krisis Ekonomi

Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mendefinisikan krisis sebagai suatu situasi yang genting dan gawat mengenai suatu kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menyangkut kehidupan.

Menurut ahli ekonomi, pengertian krisis ekonomi secara sederhana adalah suatu keadaan dimana sebuah negara yang pemerintahnya tidak dipercaya lagi oleh rakyatnya, khususnya masalah finansial.[17]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa krisis ekonomi adalah kondisi yang dialami oleh suatu negara ketika warga negara tidak lagi mempercayakan urusan keuangan Negara kepada pemerintah, dan keadaan dimana sebuah Negara yang mengalami kesulitan untuk membayar hutang-hutangnya.

Adapun beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya krisi ekonomi, menurut Fischer adalah sebagai berikut :

1) Faktor Internal

a. Laju PertumbuhanLaju pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) adalah salah satu indikator utama ekonomi makro yang sering digunakan dalam menganalisis kinerja ekonomi sebuah Negara. PDB sendiri merupakan alat pengukur yang digunakan untuk melihat dan mengukur pertumbuhan ekonomi dalam selang waktu tertentu. Pada dasarnya PDB merupakan jumlah

[17] http://myasirarafat.wordpress.com/2012/05/31/apa-itu-krisis-ekonomi/di akses tanggal 14 Oktober 2021 jam 15.13 WIB

nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh unit usaha dalam suatu negara atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diperoleh dari seluruh unit di bidang ekonomi. PDB dapat berlaku pada dua hal yakni atas dasar harga PDB dapat digunakan untuk melihat adanya pergeseran dan struktur ekonomi, dan pada harga konstan PDB digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

b. Struktur Ekonomi Adanya kelemahan yang fundamental pada ekonomi makro dalam hal stuktur ekonomi juga bisa merupakan salah satu penyebab, namun mungkin bukan yang menyebabkan terjadinya kondisi krisis tetapi menyebabkan krisis tersebut dapat terus berlangsung dan semakain parah. Pada dasarnya struktur ekonomi yang lemah menggambarkan adanya ketidak-seimbangan antara perkembangan dan pertumbuhan antar sektor di satu pihak, dan tidak adanya sektor kunci walaupun sektor tersebut dominan di dalam sturktur ekonomi dengan suatu kinerja yang baik di pihak lain.

c. Perdagangan Luar Negeri (Ekspor Neto) Berdasarkan suatu laporan dari WTO (1996), struktur perdagangan dunia menunjukkan bahwa, pada tahun 1995 Negara Indonesia tidak termasuk dalam 25 besar Negara-negara pengekspor produk-produk manufaktur. Hal ini karena masih lemahnya Negara Indonesia dalam mengembangkan ekspor yang bernilai tambah tinggi, dan masih sangat tergantung pada impor produk-produk bernilai tambah tinggi dimana hal ini dianggap sebagai penyebab utama kurangnya cadangan devisa khususnya nilai dolar Amerika Serikat yang dimilik Indonesia, untuk mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sehingga nilai rupiah melemah terus dan akhirnya tidak hanya menyebabkan tetapi juga dapat memperparah krisis ekonomi.

d. Perkembangan Sektor Industri Manufaktur

Dalam fundamentall ekonomi Indonesia pada tingkat mezzo, ada dua sektor penting yang turut juga bertanggung jawab atas terjadinya krisis ekonomi di Negara Indonesia hingga saat ini, yakni sektor industri manufaktur dan sektor perbankan. Perkembangan sektor industry Negara Indoensia di bidang manufaktur masih belum baik selama periode Orde Baru, dalam arti tingkat produktivitas, efisiensi dan daya saing yang masih rendah, serta adanya ketergantungan terhadap impor dan modal asing juga merupakan salah satu penyebab lemahnya fundamental ekonomi Indonesia.

2) Faktor Eksternal

Selain faktor-faktor internal, menurut Fischer (1998), krisis ekonomi di Asia juga diakibatkan oleh perkembangan perekonomian negara-negara maju dan pasar keuangan global sehingga menyebabkan adanya ketidak seimbangan global.Faktor eksternal lainnya disebabkan oleh daya saing Negara Indonesia di Asia yang masih lemah, sedangkan tingkat nilai tukar mata uang dari Negara-Negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia terhadap dolar AS masih terlalu kuat (Over valued). Selain faktor-faktor ekonomi, krisis di Asia itu juga disebabkan oleh faktor-faktor non-ekonomi, seperti aspek sosial, budaya, kultur dan aspek politik. Factor psikologis juga sangat berperan sehingga membuat krisis rupiah menjadi krisis ekonomi yang besar. Dampak psikologis muncul dari krisis di Indonesia adalah terjadinya kepanikan yang melanda masyarakat keuangan internasional, sehingga para pemilik modal internasional memindahkan modal mereka dengan jumlah yang tinggi dari Negara Indonesia secara tiba-tiba.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya krisis di pengaruhi oleh factor internal dan eksternal. Pandemi bisa dikatakan merupakan factor eksternal yang mengkibatkan krisis ekonomi melanda berbagai Negara terkhusus Indonesia, banyak sector perusahaan besar

dan kecil yang terhambat dalam kegiatan produksi akibat pandemi ini, fenomena tersebut membuat mereka terpaksa mengambil langkah seperti, pengurangan jam kerja, pengurangan gaji, hingga memutus kontrak para pekerja, sehingga para pekerja tersebut tidak memiliki pendapatan lagi. Akibatnya, mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengalami kepanikan atau stress karena hal tersebut.[18]

2. Krisis Ekonomi di Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19

Perekonomian Indonesia telah memasuki krisis sejak triwulan kedua 2020. Dua hal yang menjadi alasan utama di balik krisis ini adalah semakin banyak populasi yang terinfeksi COVID-19 (termasuk populasi produktif). Situasi ini mengurangi kemampuan rumah tangga mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama bagi rumah tangga yang terdampak langsung oleh pandemi COVID-19. Alasan kedua adalah mengenai pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah membuat perekonomian tidak beroperasi 100% dari kapasitas optimalnya karena sebagian usaha harus ditutup dan sebagian pekerja terpaksa dirumahkan.

Terkait krisis ekonomi, salah satu indikatornya adalah angka pertumbuhan ekonomi. Pada 5 Mei 2021, Badan Pusat Statisitik (BPS) merilis laporan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh sebesar -0,74% pada triwulan pertama 2021. Kondisi perekonomian pada triwulan pertama 2021 tersebut jauh lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi meski menunjukkan perbaikan bila dibandingkan dengan kondisi pada 2020. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih berada di bawah laju kondisi normal sebelum terjadi pandemi. Pada saat yang sama, laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita (ukuran kesejahteraan rata-rata nasional) juga turun sebesar 3,15% pada

[18] Tulus Tambunan, *Krisis Ekonomi Indonesia: Teori dan Empiris*, (Jakarta : Universitas Trisakti,2011), hal 82-84

2020. Artinya, terjadi penurunan tingkat kesejahteraan rumah tangga Indonesia selama 2020 dibandingkan 2019.[19]

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode Agustus 2020, jumlah angka pengangguran meningkat 2,67 juta orang. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi 9,77 juta orang.Tingkat pengangguran terbuka Provinsi DKI Jakarta pada Agustus 2020 sebesar 10,95 persen atau setara 572.780 orang. Bila dibandingkan dengan keadaan Agustus tahun lalu, pengangguran DKI Jakarta naik 4,41 persen atau bertambah 233.378 orang. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab kenaikan tingkat pengangguran di Ibu Kota. Sebanyak 175.890 pengangguran disebabkan karena Covid-19. Mereka berhenti bekerja karena perusahaannya terdampak Covid-19 atau pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).[20]

Peningkatan jumlah pengangguran pun turut membuat jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan. Data BPS menunjukkan, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 27,55 juta orang pada September 2020. Jumlah tersebut meningkat 2,76 juta dibandingkan posisi September 2019. Angka tersebut membuat kemiskinan Indonesia kembali ke level 10 persen dari jumlah penduduk, yakni sebesar 10,19 persen. Dengan demikian, tren penurunan angka kemiskinan yang terjadi hingga tahun 2019 pun terhenti. Sebab dampak pandemi mulai terasa pada kuartal I-2020. Persentase penduduk miskin naik menjadi 9,78 persen, atau naik 0,37 persen dari Maret 2019.[21]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa adanya pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi terhadap turunnya

---

[19]Ridho Al Izzati, Artikel Semeru Research Institute, *"Situasi Kemiskinan Selama Pandemi"*, , (Diakses pada tanggal, 13Oktober 2021, pukul 21.15 WIB)

[20]https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/493/dampak-covid-19--pengangguran-dki-jakarta-tembus-dua-digit.html , (diakses pada, 10 Oktober 2021, pukul 20.00 WIB)

[21]https://money.kompas.com/read/2021/03/02/161627926/satu-tahun-pandemi-jumlah-pengangguran-nyaris-10-juta-angka-kemiskinan-tembus?page=all#page2 , (diakses pada, 10 Oktober 2021, pukul 20.35 WIB)

perekonomian di Indonesia, karena banyaknya kebijakan yang diberlakukan pemerintah dalam rangka mengatasi penyebaran atau upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19 mengakibatka kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan bahkan berhenti berproduksi. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan pengangguran, penurunan tingkat produksivitas baik individu maupun perusahaan, dan memicu kenaikan jumlah kemiskinan di Indonesia.

B. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan berasal dari kata miskin yang berarti tidak berharta benda; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Dalam arti luas kemiskinan tidak saja berkaitan dengan rendahnya tingkat kepemilikan harta benda, tetapi juga berhubungan dengan terbatasnya berbagai potensi di luar kehartabendaan, seperti miskin pengetahuan, miskin kekuasaan, miskin kasih sayang dan sebagainya.[22]

Kemiskinan merupakan kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan kondisi seperti ini, ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.[23]

Dari banyaknya definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor

---

[22]Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, h. 7.

[23]Abadullah Kurniawan, "Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Solotong Ditinjau Dari Prespektif Ekinomi Islam", *Skripsi*, UIN Sumatera Utara Medan, 2020, hal. 24.

yang penyebab kemiskinan. Kajian tersebut dapat terlihat pada definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers dan definisi tersebut yang saat ini mendapat perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang. Chambers menyatakan bahwa definisi kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi yaitu:

a. Kemiskinan (*proper*)

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pada kelompok yang telah memiliki pendapatan namun tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

b. Ketidakberdayaan (*powerless*)

Rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau kelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

c. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*)

Seseorang atau sekolompok orang yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan yang cukup untuk menyelesaikannya.

d. Ketergantungan (*dependence*)

Lemahnya kekuatan sosial dari seseorang atau kelompok orang yang disebut miskin menyebabkan tingkat ketergantungan terhadapa pihak lain adalah sangat tinggi.

e. Keterasingan (*isolation*)

Dimensi keterasingan yang dimaksudkan oleh Chambers adalah factor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang

menjadi miskin. Umumnya kondisi ini berada pada daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi.[24]

Dengan demikian dapat dipahami bahwa masyarakat miskin merupakan masyarakat yang selalu berada pada kondisi ketidakberdayaan atau ketidakmampuan mereka dalam hal memenuhi kebutuhan dasar, yaitu ketidakmampuan dalam: (1) melakukan kegiatan usaha produktif, (2) menjangkau akses sumber daya social ekonomi (3) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif, dan (4) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.

2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Masalah kemiskinan dan faktor penyebab kemiskinan memperluas pandangan ilmu pengetahuan bahwa kemiskinan tidak hanya sekedar tidak dapatnya seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional.

Berdasarkan permasalahan tersebut kemiskinan memiliki 4 bentuk yakni sebagai berikut:

a. Kemiskinan absolute

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

b. Kemiskinan relative

[24]Rulan Ahmad, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin : Pendekatan Modal Manusia (Studi Layanan Publik tantang Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang Diselenggaraakan oleh BPM-KB dan Posko 100 di Kota Surabaya)*, Jurnal Administrasi Publik Vol. 10, No.2 (Desember 2012), hal. 12

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

c. Kemiskinan kultural

Kemiskinan yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan masyarakat modern.

d. Kemiskinan structural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumberdaya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.[25]

3. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan diberbagai bidang yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, keterbelakangan, dan keterpurukan, yang disebabkan oleh perubahan sosial diantaranya terkena musibah bencana alam, pemutusan hubungan kerja, serta menderita akibat perubahan sosial ekonomi, jumlah penduduk yang semakin banyak tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan primer (pokok). Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan telah menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Kemiskinan bukan hanya masalah Indonesia, tetapi merupakan masalah dunia sehingga lembaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia pada tahun 1990, lewat laporannya World Development Report on

[25] Michael P. Todaro dan Sthepan C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan,* (Jakarta : Erlangga, 2003), hal. 2477

Poverty mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga tempat :

1) Pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin
2) Pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan dan gizi) yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciftakan oleh pertumbuhan ekonomi
3) Membuat sarana jaringan pengaman sosial untuk mereka di antara penduduk miskin yang sama sekali tidak mampu untuk medapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan kesempatan pengembangan SDM akibat ketidak mampuan fisik dan mental, bencana alam, dan konflik sosial. [26]

4. Pengentasan Kemiskinan di Masa Pandemi Covid-19

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2020 dan diubah pada PP No. 43 Tahun 2020. Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dilaksanakan dengan prinsip asas keadilan sosial, sebesar-besarnya kemakmuran rakyal,mendukung Pelaku Usaha, menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian,

[26]Tulus T. H Tambunan, *Perekonomian Indonesia,* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hal. 131

serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menimbulkan *moral hazard* dan adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Program perlindungan sosial pada hakekatnya memiliki tujuan mulia untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi dirinya dari bencana dan kehilangan pendapatan. Peran vital perlindungan sosial tercermin pula dari kebijakan pemerintah atas program PEN, dimana salah satu program PEN yang merupakan program kebijakan komprehensif untuk menyelamatkan jiwa dan perekonomian adalah program perlindungan sosial. Perlindungan sosial mempunyai peranan yang sangat krusial di masa pandemi Covid-19 untuk menjaga tingkat konsumsi terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).Sektor perlindungan sosial yang digunakan dalam program PEN antara lain untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako Jabodetabek, Bantuan Sosial Tunai Non-Jabodetabek, Kartu Prakerja, Diskon Listrik, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), dan Perlindungan sosial lainnya. Dari seluruh program perlindungan sosial yang selama ini telah dijalankan, pemerintah memasukkan beberapa di antaranya sebagai bagian dari program PEN. Ada tiga pendekatan yang dilakukan terkait perlindungan sošial selama pandemi, yaitu melanjutkan program yang sudah ada, menyesuaikan manfaat, dan waktu penyaluran dari beberapa program sesuai kebutuhan penanganan pandemi, dan menjalankan program baru. Menyesuaikan waktu dan manfaat dari beberapa program sesuai kebutuhan penanganan pandemik merupakan salah satu elemen penting dari perlindungan sosial.[27]

[27]Muhammad Rizki, *"Dampak Program Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Tengah Pandemi COVID-19",* (Jurnal Good Governance : Vol.17 No.2, September 2021), hal.128

5. Kemiskinan Dalam Prespektif Islam

Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Dalam pengertian yang lebih definitif, Syekh An-Nabhani mengkategorikan yang punya harta (uang), tetapi tidak mencukupi kebutuhan pembelanjaannya sebagai orang fakir. Sementara itu, orang miskin adalah orang yang tidak punya harta (uang), sekaligus tidak punya penghasilan.[28]

Salahsatu ayat al-Quran yang membahas tentang miskin dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS.Al-Balad ayat16:

اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍۗ

Artinya:"*Atau kepada orang miskin yang sangat fakir".*[29]

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Balad ayat 16 ini menjelaskan bahwa miskin adalah: "Yakni sangat miskin sehingga menempel ditanah,lagitak punyaapa-apa.Ibnu Abbas mengatakan bahwa *dza matrabah* artinya orang miskin yang terlempar di jalan (gelandangan), tidak punya rumah,dan tidak punya sesuatu yang dapat menghindarinya dari menempel di tanah.

Kemiskinan atau kefakiran adalah suatu fakta, yang dilihat dari kacamata dan sudut manapun seharusnya mendapat pengertian yang sesuai dengan realitasnya. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidakterpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan,dan papan.[30]

---

[28]SriBudiCantikaYuli,*StrategiPengentasanKemiskinanDalamPerspektifIslam*(JurnalEkonomika-Bisnis:Vol.n 4No.2Juli2013), hal.103

[29]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah,* (Bandung: Diponegoro, 2011), hal.594

[30]Sri Budi Yuli Cantika, *"Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Prespektif Islam",*(Jurnal Ekonomika-Bisnis: Vol.4, No.2 Juli 2013), hal.103-104

Berdasarkan pandangan para imam mazhab fiqih, KH. Ali Yafie menjelaskan bahwa orang miskin adalah orang yang memiliki harta atau memiliki pekerjaan atau memiliki keduanya, tetapi harta atau hasil dari pekerjaannya itu hanya mencukupi seperdua atau lebih dari kebutuhan pokoknya. Sementara itu, menurutnya orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap atau memiliki penghasilan, tetapi penghasilannya hanya mencukupi kurang dari seperdua dari kebutuhan pokoknya.[31]

Al-Ghazali mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan untuk memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukanlah kemiskinan. Jika barang yang dibutuhkan tersedia dan terjangkau oleh seseorang, maka dia tidak akan diperlakukan sebagai orang miskin. Al-Ghazali membagi kemiskinan menjadi dua bagian; 1) kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan material dan 2) kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan rohani.[32]

Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kemiskinan ini semakin merajalela maka ini akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama. Ini bagaikan seorang kaya yang apabila terlalu menjadi seperti raja, maka kekayaannya menjadikannya seperti seseorang yang zalim, baik kepada Allah maupun kepada manusia lainnya, ada beberapa bentuk kezaliman seperti zalim kepada Allah, zalim kepada manusia, dan zalim kepada dirinya sendiri.[33]

---

[31]Asep Usman Ismail, *Al-Quran dan Kesejahteraan Sosial,* hal.38-39
[32]Asep Usman Ismail, *Al-Quran dan Kesejahteraan Sosial,* hal.42
[33]Asep Usman Ismail, *Al-Quran dan Kesejahteraan Sosial,* hal.43

Banyak sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah SAW sendiri pernah memohon perlindungan Allah SWT dari kemiskinan. Apabila memang kemiskinan tidak berbahaya, maka tentunya Rasulullah tidak perlu meminta permohonan perlindungan kepada Allah dari kemiskinan. Sebagaimana yang diterangkan dalam Hadist berikut, yang berarti:

"*Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari fitnah api neraka, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kekayaan dan juga berlindung pada-Mu atas fitnah kemiskinan*." (HR. Abu Daud, Nasa"I dan Ibnu Majah)

Tampak dari hadist tersebut sesungguhnya Rasulullah SAW berlindung kepada Allah SWT dari semua hal yang melemahkan baik secara materi maupun secara maknawi, baik kelemahan itu karena tidak mempunyai uang (kemiskinan), atau tidak mempunyai harga diri dan juga karena hawa nafsu (kehinaan).[34]

Menurut Al-Maududi, untuk mengatasi kemiskinan, maka yang akan digunakan dan diterapkan yaitu sistem ekonomi Islam dengan karakteristik, sebagai berikut: (1) berusaha dan bekerja; (2) larangan menumpuk harta; (3) zakat; (4) hukum waris; (5) ghanimah; (6) hemat. [35]

Islam telah menetapkan dasar-dasar pembebasan manusia dari kemiskinan yang pelaksanaannya diwajibkan yang disertai janji pahala atau ancaman dosa, ataupun mencukupkan upaya meringankan tekanan kemiskinan hanya dengan cara kejiwaan, yakni bergaul bersama dan menghibur kaum fakir miskin berdasarkan faktor ketakwaan saja, tapi Islam menggunakan kedua cara itu bersama-sama, yakni cara pelaksanaannya yang diwajibkan dan cara kejiwaan. Dengan ini menjadi

---

[34]Muhammad Bagir, *Kemiskinan dan keterbelakangan di Negara-Negara Muslim,* Bandung :Mizan, 1985, hal. 36

[35]Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam,* Jakarta : Kencana, 2017, hal. 23-25

jelas kekeliruan orang-orang yang bersikap ridha (pasrah dan memuaskan diri) dengan apasaja yang berada di hadapannya dengan dalih bahwa Allah telah membagi-bagi rizki antara seluruh manusia dan telah menjadikan sebagian mereka kaya dan sebagian lainnya miskin.[36]

Menurut ajaran Islam, kaya dan miskin merupakan sebuah sunnatullah atau ketetapan Allah atas manusia. Karena manusia bermacam-macam. Diantara mereka diberikan kecerdasan, kemampuan dalam berkomunikasi,dan di antara mereka juga mempunyai sifat yang berbeda beda, terdapat golongan yang rajin bekerja, dan ada golongan pemalas.[37]

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: "*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan*." (Az-Zukhruf: 32).

Islam mengajarkan bahwa harta yang dimiliki oleh orang mampu, baik kelompok kaya atau golongan menengah yang berkecukupan harta, terdapat bagian yang sebenarnya bukan milik mereka. Terdapat banyak

[36]Muhammad Bagir, *Kemiskinan dan keterbelakangan di Negara-Negara Muslim*,hal. 38

[37]Muheramtohadi S (2018), *Aktualisasi Ekonomi Islam dalam Menurunkan Tingkat Ketimpangan di Indonesia*, Bisei : Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam, hal. 21, http://ejotnal.unhasy.ac.id/index.php/bisei/article/view/283.

nash maupun hadits yang mendukung pernyataan bahwa sistem ekonomi sebagaimana yang diharapkan Islam adalah terbentuknya jaminan pemenuhan kebutuhan dasar semua rakyatnya.

Mengurangi kesenjangan ekonomi lewat penerapan etika islam yang dapat diterapkan secara universal yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu: (1) mendistribusikan harta dari negara kepada kelompok tidak mampu, dan menghindari kebijakan yagn merugikan kelompok lemah, dan mencegah berputarnya kekayaan di antara orang kaya; (2) mencegah jatuhnya asset ekonomi, baik berupa lahan, pertambangan ataupun sektor lain yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh swasta, karena hal ini berlawanan dengan prinsip Nabi, bahwa manusia berserikat pada sumbersumber ekonomi yang penting; serta (3) fokus pada sektor riil, terutama sektor UMKM, yang menyerap mayoritas tenaga kerja.[38]

6. Pengentasan Kemiskinan Dalam Prespektif Islam

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan ahlak, kelogisan berfikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islampun memandangnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Untuk mengatasi kemiskinan digunakan dan diterapkan sistem ekonomi Islam dengan karakteristik sebagai berikut: 1) Berusaha dan bekerja,2) Larangan menumpuk harta, 3) Zakat, 4) Hukum waris, 5) Ghanimah, 6) Hemat. Namun seiring berkembangnya zaman tentu dari keenam poin yang masih relevan untuk diterapkan hanya 5 poin karena saat ini konsep ghanimah sudah tidak ada lagi.[39]

Menurut Quraisy Shihab, secara garis besar usaha pengentasan kemiskinan dalam islam dapat dibagi pada tiga hal pokok yaitu:

a. Kewajiban Setiap Individu

[38]Muheramtohadi S (2018), *Aktualisasi Ekonomi Islam dalam Menurunkan Tingkat Ketimpangan di Indonesia*,hal. 22

[39]Qardhawi, 2005 dalam Nurul Huda dkk.,*Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015) hlm. 25

Dalam Islam setiap orang yang hidup dimuka bumi diwajibkan untuk bekerja atau mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya. Mereka juga diperintahkan agar berkelana dibumi Allah SWT serta makan dari rezeki-Nya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Qs. Al-Jumuah ayat 10 sebagaiberikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ
وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya :*"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung"*[40]

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Jumuah ayat 10 menjelaskan bahwa setelah mereka dilarang untuk bertransaksi sesudah seruan yang memerintahkan mereka berkumpul (sholat), kemudian diizinkanlah bagi mereka sesudah itu untuk bertebaran dimuka bumi untuk mencari karunia Allah.

Pada surat Al-jumuah ayat 10 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa adanya kewajiban individu untuk bekerja/mencari nafkah. Hal ini merupakan salah satu cara utama dalam mengentaskan kemiskinan, ia adalah sarana utama dalam memperoleh kekayaan serta faktor dominan dalam memakmurkan dunia.

b. Kewajiban Kelompok/Masyarakat

Dalam hal mengatasi kemiskinan Islam memerintahkan anggota keluarga untuk saling menjamin dan mencukupi, artinya Islam telah meletakkan modal pertama bagi terciptanya jaminan

[40]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah,* (Bandung: Diponegoro, 2011), hal.554

sosial. Islam juga tidak bersikap acuh dan membiarkan nasib fakir miskin terlantar, sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan bagi mereka suatu haktertentu yang ada pada harta orang-orang kaya dan suatu bagian yang tetap dan pasti ialah zakat. Seperti dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 215 sebagaiberikut:

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ
وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ
عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya :*Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan.*[41]

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 215 menjelaskan bahwa : "Muqatil Ibnu Hayyan mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah naafkah *tatawwu*". As-saddi mengatakan bahwa ayat ini di-nasakh oleh zakat, tetapi pendapatnya masih perlu dipertimbangkan. Makna ayat ini adalah seruan untuk membelanjakan harta kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan".

Pada surat Al-Baqarah ayat 215 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa zakat yang diberikan adalah salah satu cara untuk saling menjamin dan mencukupi hidup baik antar kerabat dekat, anak yatim maupun sesama kaum muslim yang memerlukan pertolongan.

[41]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah,* (Bandung: Diponegoro, 2011), hal.33

c. Kewajiban Pemerintah

Dalam paradigma Islam Pemerintah berkewajiban dalam mengentaskan kemiskinan pada daerah yang ia pimpin sebagaimana dijelaskan dalan Qs. Al-Hadid ayat 25 sebagai berikut :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ
وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ
شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
قَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya :*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.*[42]

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Hadid ayat 25 menjelaskan bahwa: “ maksud keadilan pada ayat ini menurut Mujahid dan Qatadah serta selain keduanya mengtakan bahwa keadilan itu ialah perkara hak yang diakui oleh rasio yang sehat lagi lurus dan bertentangan dengan pendapat-pendapat yang sakit lagi tidakbenar”.

Pada suarat Al-Hadid ayat 25 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa pemerintah merupakan pemimpin yang memangku amanah untuk mensejahterakan negara yang ia pimpin, termsuk penegakan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Komitmen Islam yang besar terhadap persaudaraan dan keadilan menutut pada terpenuhinya kebutuhan hidup terutama pada kebutuhan dasar,

[42]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah,* (Bandung: Diponegoro, 2011), hal.539

pendidikan dankesehatan.[43]

C. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh, akibat atau efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.[44] Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.[45] Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan suatu organisasi. Sedangkan pengertian efektivitas menurut beberapa ilmuan adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas menurut Agung Kurniawan adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

b. Efektivitas menurut Martani dan Lubis merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Efektivitas menurut Mahmudi merupakan hubungan antar output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output

[43]Kartiawati, " Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Kampung Bonglai Kec.Banjit Kab.Way Kanan)" *Skripsi*, IAIN Raden Lampung, 2017, hal. 41

[44]Sulkan Yasin dan Sumarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru* (Surabaya : Mekar, 2008), hal.132

[45]Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2007), hal . 4

terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. [46]

Dari beberapa pengertian efektivitas yang ditemukan oleh beberapa para ahli di atas, maka dapat dipahami bahwa efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa para ahli di atas, makadapat dipahami bahwa efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya yang ditentukan sebelumnya.

Penillaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan dari program tersebut.

2. Ukuran Efektivitas

Ukuran Efektivitas Tingkat efektivitas dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai, artinya apabila hasil tersebut dapat dicapai sesuai dengan rencana awal maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu kegaiatan tidak dapat dicapai sesuai rencana awal atau terdapat kekeliruan dalam pelaksanaanya maka kegiatan tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Berikut adalah 3 indikator dalam menentukukan ukuran efektivitas :

1. Pencapaian Tujuan

[46]Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hal. 92

Pencapaian Tujuan dalah seluruh upaya dari pencapaian tujuan harus dipandang sebagai sebuah proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yakni Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit dari sebuah program.

2. Integrasi

Integrasi berkaitan dengan proses sosialisasi. Yang mana hal ini adalah sebuah pengukuran dari sebuah organisasi apakah sudah mampu mengadakan sosialisasi dan menjalin komunikasi dengan organisasi lainnya atau belum.

3. Adaptasi

Adalah kemampuan untuk melakukan penyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Menurut Budian, untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :

a. Ketepatan sasaran program

Yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

b. Sosialisasi program

Yaitu kemampuan penyelenggara program di dalam melakukan sosialisasi program maka informasi mengenai pelaksanaan program bisa tersampaikan untuk masyarakat pada umumnya serta sasaran peserta program pada khususnya.

c. Tujuan program

Yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Pemantuan program

Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.[47]

D. Bantuan Sosial Tunai

1. Pengertian Bantuan Sosial Tunai

Bantuan Sosial Tunai atau BST adalah bantuan sosial berupa uang tunai yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar. BST Pemprov DKI Jakarta tentunya berbeda dengan BST Pemerintah Pusat atau yang dikenal dengan BST Kemensos. BST Kemensos disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui PT Pos Indonesia (Persero), dengan anggaran yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial RI. Sedangkan, BST Pemprov DKI Jakarta disalurkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui rekening penerima BST di Bank DKI dengan anggaran yang bersumber dari APBD DKI Jakarta. Penerima BST merupakan keluarga penerima Bantuan Sosial Sembako tahun 2020 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan pencatat sipil Provinsi DKI Jakarta yang telah diperbaharuai dan disepadankan.[48]

2. Bentuk Bantuan

Bantuan Sosial Tuani yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan bentuk perlindungan sosial dari pemerintah bagi masyarakat terdampak sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa pandemi COVID-19. Nominal BST (Bantuan Sosial Tunai) sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat. Bantuan Sosial Tunai pada 2021 diberikan melalui kartu ATM Bank DKI agar mengurangi pungutan liar. Masyarakat dapat

---

[47] Cindy Vatika Sari, *"Efektivitas Pelaksanaan Program Mappadeceng Dinas Sosial Kabupaten Soppeng"* Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, hal. 14-15

[48] Mike Nafisah, *Cek informasi Bantuan Sosial Tunai Jakarta di Sini*, https://smartcity.jakarta.go.id/blog/637/cek-informasi-bantuan-sosial-tunai-jakarta-di-sini , 11 Oktober 2021, Pukul 20.00 WIB.

menggunakan langsung dana BST dengan menarik uang di ATM, sehingga lebih leluasa memanfaatkannya.[49]

3. Dasar Hukum Bantuan Sosial Tunai

Dasar hukum dalam suatu program merupakan hal yang sangat penting untuk menunjukan bahwa program tersebut dianggap sah, legal dan dibenarkan secara hukum. Berikut ini adalah Peraturan dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta yang berkaitan dengan Program Bantuan Sosial Tunai :

1) Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2021, Tentang Penerimaan Dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Bagi Masyarakat Terdampak *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) Dalam Rangka Perlindungan Sosial Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2) Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 570 Tahun 2021, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penerima Dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Bagi Masyarakat Terdampak *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) Dalam Rangka Perlindungan Sosial Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021, Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).
4) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 35 Tahun 2021, Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial.

[49] BST Bantu Warga DKI yang Terdampak Pandemi, https://nasional.tempo.co/amp/1517606/bst-bantu-warga-dki-yang-terdampak pandemi , (di akses pada 20 oktober 2021, pukul 23.25)

5) Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 235 Tahun 2021, Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penerima Dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Bagi Masyarakat Terdampak *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) Dalam Rangka Perlindungan Sosial Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.[50]

4. Syarat-syarat Penerima Bantuan Sosial Tunai

Berikut ini adalah syarat-syarat yang telah ditentukan bagi penerima atau Keluarga Penerima manfaat program Bantuan Sosial Tunai (BST):

1) Keluarga Penerima Manfaat adalah masyarakat golongan menengah kebawah atau masyarakat yanag kehilangan mata pencaharian akibat dari pandemi COVID-19.
2) Terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial Sembako tahun 2020 hasil pembaruan dan pemadaan data Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta.
3) Keluarga Penerima Manfaat tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan/ atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).[51]

5. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai

a. Pendistribusian Bantuan Sosial Tunai
   1) Bank DKI membuat / mencetak surat undangan kemudian mengirimkan ke setiap kelurahan.
   2) Kelurahan melakukan pensortiran setiap per RW dan RT, kemudian dikirim ke wilayah.
   3) Kemudian Undangan tersebut dibagikan Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), melalui RT dan Rw setempat.
   4) Kemudian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat memproses pengambilan dana bantuan tersebut sesuai tangal dan lokasi yang tertera di dalam undangan tersebut, dengan membawa persyaratan

[50]Data dari Dinas Sosial DKI Jakarta
[51]https://corona.jakarta.go.id/id/informasi-bantuan-sosial , tanggal 15 Oktober 2021 pukul 23.15

seperti : Undanga pendistribusian, Kartu Tanda Penduduk (asli dan salinannya), dan Kartu Keluaraga (asli dan salinannya).

5) Proses pengambilan karut ATM dan dan BST (Bantuan Sosial Tunai) dapat diwakilkan oleh penerima kuasa yang ada dalam satu KK (Kartu Keluarga), dengan persyaratan : surat kuasa dari penerima BST, Surat kuasa dari pemberi kuasa, KTP dan KK (asli dan salinan kedua pihak tersebut)
6) Penerima BST apabila kuasa berada diluar KK, seperti paman, bibi, atau nenek, persyaratannya : surat pengantar Dinas Sosial melalui satuan pelaksanaan sosial kecamatan atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah), KTP dan KK (asli maupun Salinan dari pemberi kuasa dan penerima kuasa).

b. Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai

Pelaksanaan Pendistribusian kartu ATM Bantuan Sosial Tunai, dilakukan bertahap sebanyak 6 tahap dari bulan Januari sampai bulan Juni :

1) Tahap 1 :
   I. Undangan ke-1 : 12 Januari-5 Februari
   II. Undangan ke-2 : 15 Februari -19 Februari
   III. Undangan ke-3 : 5 Maret-15 Maret
2) Tahap 2 :
   I. Undangan ke-1 : 29 Maret -31 Maret
   II. Undangan ke-2 : 15 April
   III. Undangan ke-3 : 22 April
3) Tahap 3 dan 4 tidak ada usulan baru
4) Tahap 5 dan 6, merupakan usulan baru bagi masyarakat yang gagal pada pendistribusianBST pada tahap sebelumnya.[52]

E. Kesejahteraan

[52]Data dari Dinas Sosial DKI Jakarta

1. **Pengertian Kesejahteraan Masyarakat Secara Umum**

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut.[53]Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kecukupan pemenuhan kebutuhan, orang yang merasa sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram dan batinnya terpelihara, ia merasa keadilan ada dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan terhindar dari bahaya kemiskinan yang mengancam.[54]

Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (1): "kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsisosialnya.[55]

Dapat diketahui dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa kesejahteraan merupakan peningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang lebih baik darisebelumnya.

2. **Indikator Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator-indikator kesejahteraan yang merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak.[56] Berikut ini beberapa indikator kesejateraan masyarakat menurut beberapa instansi pemerintah, antara lain sebagai berikut:

---

[53]Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah,* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012) hlm. 146

[54]Anwar Abbas, *Bunghatta dan Ekonomi Islam,* (Jakarta, Multi Press Indo, 2008) hlm.126

[55]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1)

[56]Badrudin, *Op.,Cit,* hlm.148

a. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(BAPPENAS)

Menurut BAPPENAS, status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok.[57]

b. Badan Pusat Statistik(BPS)

Kriteria untuk menentukan atau rumah tangga miskin seperti:

1. luas bangunan peranggota rumah tangga/keluarga kurang dari 8 meterpersegi.
2. Lantai rumah berupa tanah/papan dengan kualitas rendah.
3. Dinding rumah berupa bambu/papan dengan kualitas rendah.
4. Fasilitas MCK belum tersedia.
5. Sumber air minum bukan air minum bersih.
6. Sumber penerangan yang digunakan bukan listrik.
7. Jenis bahan bakar untuk memasak adalah kayu/arang.
8. Frekuensi makan dalam sehari kurang dari 2 kali.
9. Tidak mampu membeli daging /susu/ayam dalam seminggu.
10. Tidak memiliki kemampuan membeli baju baru setiap anggota rumah tangga.
11. Tidak memiliki kemampuan berobat kepuskesmas/poliklinik.
12. Lapangan pekerjaan berupa petani, nelayan, ataupekebun.
13. Pendidikan kepala rumah tangga tidak tamat SD/tidak sekolah.
14. Tidak memiliki asset/barang berharga minimal Rp.500.000.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi, maka dikategorikan sebagai

[57]Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kedeputian Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan, *Laporan Akhir "Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (keluarga pra sejahtera/KPS dan keluarga sejahtera 1/KS1),* BAPPENAS, Jakarta: 2010, hlm.10

rumah tangga miskin atau tidak sejahtera.[58]

c. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(BKKBN)

BKKBN membagi indikator kesejahteraan kedalam 5 (lima) tahapan tingkat kesejahteraan keluarga yaitu:

1) Tahap *pra sejahtera*

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keluarga berencana.

2) Tahap *sejahtera I*

Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang menjamin kehidupan yang layak. Secara opersional mereka tampak *tidak mampu* memenuhi salah satu indikator sebagai berkut:

a. Melaksanakan ibadah agama dan kepercayaanmasing-masing.
b. Paling kurang satu kali dalam seminggu makan daging/ ikan/ telur.
c. Memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam satu tahun.
d. Luas lantai rumah 8M^2 untuk setiap penghuni rumah.
e. Tiga bulan terkahir keluarga dalam keadaan sehat.
f. Ada anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan
g. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulislatin
h. Pasangan usia subur dengan 2 atau lebih menggunakan alat kontrasepsi.

3) Tahap *Sejahtera II*

[58]Badan Pusat Statistik, *Indikator Kemiskinan*,(On-line) tersedia di: www.bps.go.id, diakses pada (Jumat 10 November 2021 Pukul 20:25 WIB)

Secara operasional mereka tampak *tidak mampu* memenuhi salah satu indikator berikut:

a) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuanagama
b) Sebagian penghasialan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang
c) Makan bersama paling kurang satu kali dalam seminggu untuk berkomunikasi
d) Mengikuti kegiatanmasyarakat
e) Memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV danmajalah

4) Tahap *sejahtera III*

Secara operasional mereka tampak tidak mampu memenuhi salah satu indikator sebagai berikut:

a. Memberikan sumbangan materil secarateratur
b. Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan

5) Tahap *sejahtera III plus*

Keluarga sejahtera III plus merupakan keluarga yang dapat memenuhi semua indikator dari krluarga para sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, dan sejahtera III.[59]

3. Pengertian Kesejahteraan *(Falah)* dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kata *al-falah* dengan segala derivasinya didalam Alquran ditemukan dalam 40 tempat. Kata turunan selanjutnya dari *al-falah* adalah *yuflihu, yuflihani, tuflihu, yuflihna* (semua kata itu tidak ada dalam Al-Quran), dan *tuflihuna* (disebut sebelas kali dalam Al-Quran dan selalu

[59]Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Indikator Kemiskinan*,(On-line) tersedia di: www.bkkbn.go.id/datadaninformasi/materi/, (diakses pada12 November 2017 Pukul 22:30 WIB)

didahului dengan kata *laallaikum.* Makna *laallaikum tuflihuna* adalah supaya kalian berbahagia). Falah menyangkut konsep yang bersifat dunia dan akhirat.Untuk kehidupan dunia, falah mencakup tiga pengertian,yaitu; kelangsungan hidup, kebebasan dari kemiskinan, serta kekuatan dan kehormatan. Sementara itu untuk kehidupan akhirat, dijelaskan oleh Al-Asfahani di dalam Mujamnya, falah mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi dan pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan.[60]

Muhammad Akram Khan menjelaskan bahwa *falah* secara literal berarti untuk berkembang ,untuk menjadi bahagia, memiliki keberuntungan atau kesuksesan. Sedangkan secara teknis menyiratkan arti sukses diakhirat.*Falah* dibangun atas dasar percaya kepada Allah, rasulullah, kehidupan di akhirat dan perilaku sehari-hari sesuai dengan syariah. Negara bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi seperti itu, harus memfasilitasi pencapaian falah ditingkat individu dan kolektif. Dengan melihat berbagai kondisi falah sebagai berikut:

a. Kondisi spiritual falah, adalah kerendahan hati dalam doa, kesadaran terhadap Allah (taqwa), mengingat Allah, syukur kepada Tuhan,bertaubat dan pemurnian batin.
b. Kondisi ekonomi untuk falah,adalah belanja untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (zakat dan infaq) menghindari riba, memenuhi perjanjian, menghindari eksploitasi, mencari nafkah dengan bekerja keras dan menghindari kekikiran.
c. Kondisi budaya falah, adalah system doa, mengejar pengetahuan, kesucian seksual, larangan minuman keras dan perjudian, pemurnian lingkungan.
d. Kondisi politik falah,adalah jihad dan musyawah (konsultasi).

[60]Azhari Akmal Tarigan, *TafsirAyat-Ayat Ekonomi*, (Medan: FEBIUIN-SU Press, 2016),h.67-68

Ekonomi Islam mempelajari kondisi ekonomi falah. Falah adalah konsep dunia akhirat,yang menyiratkan rekontruksi karakter manusia sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus memberikan standar hidup minimum dan lingkungan yang bersih untuk seluruh penduduk, juga menunjukkan harga diri, kemandirian dan jiwa yang dimurnikan.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa *falah* adalah kehidupan yang mulia dan kesejahteraan di dunia dan akhirat,dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang.

Pendefinisian Islam tentang kesejahteraan didasarkan pandangan yang komprehensif tentang kehidupan. Kesejahteraan menurut ajaran Islam mencakup dua pengertian,yaitu:

a. Kesejahteraan holistic dan seimbang

   Yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantarake duanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual dan sekali gussosial. Manusia akan merasa jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.

b. Kesejahteraan didunia dan akhirat

   Manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/ kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi didunia ditujukan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai (*valueable*) dibandingkan kehidupan dunia.[61]

Bagaimana manusia mampu mencapai *falah* sangat tergantung pada perilaku dan keadaan manusia didunia. Secara umum, manusia

[61]Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Medan: FEBIUIN-SUPress,2018), h.29-30

menghadapi kesulitan dalam mengharmonisasikan berbagai tujuan dalam hidup karena keterbatasan ada pada dirinya oleh karena itu Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai *falah*, manusia harus menyadari hakikat keberadaannya di dunia, mengapa kita tercipta di dunia. Tidak lain manusia tercipta kecuali karena kehendak yang menciptakan, yaitu Allah sehingga manusia mencapai kesuksesan hidupnya jika dia mengikuti petunjuk pencipta.[62]

Dapat diketahui bahwa yang menjadi ukurannya adalah *syara* yaitu menjag aagama *(din)*, jiwa *(nafs)*, akal *(akal)*, kehormatan dan keturunan *(arad)* dan harta *(mal).*Artinya, jika seseorang melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara* dikatakan *maslahah.* Disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara*tersebut juga dinamakan *maslahah.* Menurut as-Syatibi, kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun akhirat,karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan *syara*diatas maka dikatakan *maslahah.*[63]

Maslahah dapat dikategorikan berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan, kandungan kemaslahatan, berubah atau tidaknya kemaslahatan, dan keberadaan *maslahah.* Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, ulama ushul fiqh membaginya kepada tiga *dhawabith* (tingkatan) yaitu: *Maslahah daruriyah, maslahahhajiyah* dan *maslahahtahsiniyah.* Jika dilihat dari segi kandungan *maslahah*, para ulama ushul fiqh membaginya kepada *maslahah amah* dan *maslahah khassah.* Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maslahah, maslahah*ada dua yaitu: *maslahah sabitah*, yaitu *maslahah* yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman seperti

---

[62]*Ibid, hal.30*

[63]Ahmad Qorib, Isnaini Harahap, *Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam,* (Journal Analytica Islamica:Vol.5,No.I,2016),h.57

berbagai kewajiban ibadahseperti shalat, puasa, zakat dan haji, dan *maslahah mutaqayyirah* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Sedangkan dilihat dari segi keberadaan *maslahah* menurut *syara*, *maslahah* terbagik epada: *maslahahmu tabarah, maslahah mulghah* dan *maslahah mursalah.*[64]

Kesejahteraan Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan social masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka. Maka sistem ekonomi Islam mencoba meredakan konflik ini sehingga terwujud kemanfaatan bersama. Bersumber dari pandangan Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:

a) Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran.
b) Pertanggung jawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memliki tanggung jawab untuk berprilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.
a) Tafakul (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakatkan akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.[65]

[64]Ahmad Qorib, *Ibid*,h.57

[65] Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2013, h. 63.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penalitian

"Metodologi berasal dari bahasa Yunani "metodos" dan "logos" terdiri dari dua suku kata yaitu "metha" yang berarti melalui atau melewati dan "hodos" yang berarti jalan atau cara. Metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. "Logos" artinya ilmu. Metodologi adalah sebuah ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran menggunakan sistem penelurusan dengan cara-cara tertentu untuk menemukan kebenaran yang tergantung dari sebuah kajian yang realitas.Metodologi adalah ilmu tentang jalan yang ditempuh untuk memperoleh pemahaman tentang sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.[66]

Menurut Toha Anggoro, penelitian adalah proses pengumpulan data dan menganalisis data atau informasi secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang sah dan mutlak.Penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.[67]

Jadi Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Dengan kata lain, metode penelitian adalah cara alamiah untuk memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Umumnya tujuan dari penelitian itu ada 3 macam yaitu : 1) Bersifat penemuan, 2) Bersifat pembuktian, atau 3) Bersifat pengembangan. Penemuan berarti datanya benar-benar baru dan memang sebelumnya belum pernah diketahui, sedangkan pembuktian berarti datanya bisa digunakan untuk membuktikan keraguan terhadap pengetahuan atau informasi tertentu. Sementara untuk pengembangan berarti data itu bisa

---

[66] Rony Kountur, "*Metode Penelitian, Untuk Penulis Skripsi dan Tesis, Edisi Revisi"*.(Jakarta: PPM, 2007), h. 31

[67] Toha Anggoro, Materi Pokok Metode Penelitian,(Jakarta: Universitas Terbuka, 2008). h. 27

memperluas dan memperdalam pengetahuan yang ada.[68] Matode yang digunakan Dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Jenis penilitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research)*. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkuangan sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.[69] Penelitian lapangan ini akan dilakukan di Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan pada penelitian ini dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskriptifkan mengenai gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi saat sekarang. [70]Penelitian kualitatif lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.[71]

   Penulis mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelitian untuk fenomena alamiah yang terjadi berdasarkan teori yang ada. Oleh karena itu, penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif tersebut untuk memaparkan dan mendeskripsikan tentang efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai dalam membantu perekonomian masyarakat terdampak pandemi Covid-19 menurut prespektif ekonomi Islam di Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur.

2. Lokasi Penelitian

   Lokasi Penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berada di beberapa RT dan RW yang ada di wilayah Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur.

3. Sumber Data

---

[68] Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), h. 45

[69]Sunardi Suryabarata, *"Metode Penelitian",* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hal.76.

[70]*Ibid*, hal.76.

[71]Abdurrahmat Fathoni, "*Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi"* (Jakarta : Rineka Cipta, 201), hal.96.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan skunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteiliti. Data ini diperoleh dari hasil wawancara (interview) atau kuesioner penelitian.[72]

Pada penelitian ini metode yang akan penulis gunakan dalam pengambilan sampling menggunakan metode *Snowball Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang diapandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya, begitu seterusnya hingga jumlah sampel semakin banyak. [73]

b. Data Skunder

Data skunder, merupakan sumber yang *tidak lamgsung memberikan* data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.[74]

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu :

1) Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan

[72] Tim FEBI UIN Walisongo Semarang, *"Panduan Penulisan Skripsi",* (semarang: 2018), hal.14.

[73]Sugiyono,*"Metode Penelitian, Kuantitatif,Kualitatif, Dan R&D"*, (Bandung: CV ALFABETA),2019,hal.85

[74]*Ibid*, hal. 137

atau responden, yaitu dengan bercakap-cakap secara taatap muka.[75]

2) Kuesioner/ angket (Questionnaire) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat petanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. [76]
3) Observasi (observation) merupakan suatu proses pengamatan yang komplek, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian.
4) Dokumentasi (Documentation) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website dan lain-lain.[77]

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan, menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[78]

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti menggunakan metode deskripsi analisis, yaitu menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai objek penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

---

[75] Beni Ahmad Saebani, *"Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi",* (Bandung: CV Pustaka Setia), 2017, hal. 92.
[76]*Op.cit.*,142.
[77]*Loc.cit.*,14.
[78]Sugiyono,*"Metode Penelitian, Kuantitatif,Kualitatif, Dan R&D"*,*Op.cit.*,hal. 244

Setelah itu data dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan sehingga memudakan untuk merencanakan kerja selanjutnya. Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan.[79]

[79]Sugiyono,*"Metode Penelitian, Kuantitatif,Kualitatif, Dan R&D"*, (Bandung: CV ALFABETA),2019, hal. 247

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Kelapa Dua Wetan

1. Letak Geografis Wilayah Kelurahan Kelapa Dua Wetan

Kelurahan Kelapa Dua Wetan merupakan satu dari lima Kelurahan yang terletak dibagian selatan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur dengan batasan-batasan wilayah sebagai berikut :

Batas Utara : Jalan Raya Ciracas Kel.Ciracas
Batas Timur : Jl. Tol Jagorawi Kel. Cipayung
Batas Selatan : Jl. Lapangan Tembak Kel. Cibubur
Batas Barat : Kali Cipinang Kel. Pekayon

2. Luas Wilayah

Kelurahan Kelapa Dua Wetan memiliki luas ± 336,86 Ha dengan cakupan meliputi :

a. Status Tanah
   1) Tanah Negara :13,00 Ha
   2) Tanah Milik Adat : 234, 27 Ha
   3) Tanah Wakaf : 0,53 Ha
   4) Tanah Lain-lain : 89,06 Ha

b. Keadaan Tanah
   1) Tanah Darat : 335,76 Ha
   2) Tanah Sawah : -
   3) Tanah Rawa / Situ : 1,10 Ha

c. Peruntukan Tanah
   1) Perumahan : 202, 77 Ha
   2) Pekebunan / Tani : 109, 29 Ha
   3) Sawah : -
   4) Fasilitas Umum: 23,55 Ha

5) Sarana Ibadah : 1,25 H[80]

3. Lembaga Pemerintahan

Berikut adalah data kepegawaian Kelurahan Kelapa Dua Wetan, penempatan pada jabatan perangkat Kelurahan dan penempatan pada jabatan sektoral :[81]

Tabel 3.1

Penempatan Pada Jabatan Perangkat Kelurahan

NO	NAMA	JABATAN
1	Sandy Adamsyah, SE	Lurah
2	Gatot Syarifuddin, SH.MM	Sekretaris Kelurahan
3	Wiwih Sriwijaya, S.Sos	Kasi Pembangunan
4	Windarti	Kasi Kesra
5	Anang Sidik Pramono, SE	Staf
6	Merli Simbolon, S.AP	Staf
7	Rama Prasetyo Adi, S.AP	Staf
8	Nur Isela A.Md	Staf
9	Welly Haryati, SE	Bendahara Kelurahan
10	Imam Santoso	Pengurus Barang

Tabel 3.2

Penempatan Pada Jabatan Sektoral

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1	H. Ilan Djaelani, SE	Dukcapil	Kasatpel
2	Hafidz Anggara	PTSP	Kanit PTSP
3	Budi Supriyanto	PTSP	Staf PTSP
4	Fauziah Fitriani, SHI	PTSP	Staf PTSP
5	Kemad	PLKB	PLKB

Sumber : Data Monografi Kelurahan Kelapa Dua Wetan 2021

[80]Dokumentasi data monografi Kelurahan Kelapa Dua Wetan tahun 2021
[81] Dokumentasi data monografi Kelurahan Kelapa Dua Wetan tahun 2021

4. Kondisi Kependudukan

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1392 Tahun 1982 maka keadaan penduduk di wilayah Kelurahan Kelapa DuaWetan dapat dikelompokan sebagai berikut :[82]

a) Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Data monografi Kelurahan Kelapa Dua Wetan, kondisi kependudukan bedasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Penduduk Menurut Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	28.527
2	Perempuan	28.710
Total		57.237

Sumber : Data Monografi Kelurahan Kelapa Dua Wetan 2021

Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2021 pada tabel di atas, dapat dilihat jumlah penduduk pada Kelurahan Kelapa Dua Wetan, sebanyak 57.237 penduduk. Dan jumlah penduduk perempuan di Kelurahan Kelapa Dua Wetan terlihat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

b) Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan data monografi Kelurahan Kelapa Dua Wetan, kondisi penduduk berdasarkan kelompok umur adalah sebagai berikut :

[82] Data Dari Kelurahan Kelapa Dua Wetan

Tabel 3.4

Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

NO	Kelompok	WNI			WNA		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	2.908	2.856	5.764	0	0	0
2	5-9	2.732	2.697	5.429	1	0	1
3	10-14	2.412	2.605	5.017	0	0	0
4	15-19	2.023	1.735	3.758	0	0	0
5	20-24	1.972	2.192	4.164	0	0	0
6	25-29	2.579	2.646	5.225	0	0	0
7	30-34	2.784	2.804	5.588	0	0	0
8	35-39	2.509	2.632	5.141	0	0	0
9	40-44	2.026	1.924	3.950	1	0	1
10	45-49	1.892	1.810	3.702	0	0	0
11	50-54	1.489	1.620	3.109	0	0	0
12	55-59	1.207	1.414	2.621	0	0	0
13	60-64	968	843	1.811	0	0	0
14	65-69	523	454	977	0	0	0
15	70-74	278	272	550	0	0	0
16	≥75	223	206	429	0	0	0
JUMLAH		28.525	28.710	57.235	2	0	2

Sumber : Data Monografi Kelurahan Kelapa Dua Wetan 2021

Dari data monografi di atas dapat dilihat, bahwa jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, mayoritas didominasi pada usia balita umur 0-4 berjumlah 5.764 dan dewasa umur 30-34, yaitu berjumlah 5.764 dan 5.588 jiwa.

c) Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelurahan Kelapa Dua Wetan, berikut adalah data penduduk menurut pekerjaan :

Tabel 3.5

Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Belum/Tidak bekerja	6.296	6.448	12.744
2	Mengurus Rumah Tangga	75	4.842	4.917
3	Pelajar/ Mahasiswa	6.517	6.317	12.834
4	Pensiunan	693	512	1.205
5	Pegawai Negeri Sipil	967	118	1.085
6	TNI	298	231	529
7	Kepolisian RI	231	187	418
8	Petani/ Pekebun	60	32	92
9	Nelayan/ Perikanan	63	8	71
10	Industri	53	15	68
11	Kontruksi	56	24	80
12	Transportasi	64	26	90
13	Karyawan Swasta	7.855	5.725	13.580
14	Karyawan BUMN	142	196	338
15	Karyawan BUMD	61	39	100
16	Karyawan Honorer	51	81	132
17	Buruh Harian Lepas	948	553	1.501

18	Buruh Tani/ Perkebunan	53	9	62
19	Pembantu Rumah Tangga	63	44	107
20	Tukang Jahit	15	15	30
21	Mekanik	48	5	53
22	Seniman	51	32	83
23	Perancang Busana	59	39	98
24	Pendeta	63	16	79
25	Wartawan	46	26	72
26	Ustad/ Mubalig	78	39	117
27	Anggota Kabinet	5	3	8
28	Dosen	77	65	142
29	Guru	650	804	1.454
30	Pilot	8	2	10
31	Pengacar	81	29	110
32	Notaris	2	2	4
33	Arsitek	10	3	13
34	Akuntan	9	36	45
35	Konsultan	19	15	34
36	Dokter	83	86	169
37	Bidan	54	169	223

38	Perawat	45	130	175
39	Apoteker	20	68	88
40	Pelaut	16	6	22
41	Sopir	220	10	230
42	Pedagang	264	69	333
43	Biarawati	3	35	38
44	Wirasuwasta	1.945	1.515	3.460
45	Lain-lain	110	84	194
	JUMLAH	**28.527**	**28.710**	**57.237**

Sumber : Data Monografi Kelurahan Kelapa Dua Wetan 2021

Dari data tersebut, terlihat mayoritas penduduk di Kelurahan Kelapa Dua Wetan bekerja sebagai karyawan swasta, yaitu berjumlah 13.580 penduduk. Namun banyak dari penduduk di Kelurahan Kelapa Dua Wetan yang belum atau tidak bekerja, yaitu sebanyak 12.744 jiwa.

d) Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut adalah data monografi, penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan Kelapa Dua Wetan :

Tabel 3.6

Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak / Belum Sekolah	7.610	5.309	12.919
2	SD Sederajat	4.411	3.538	7.949
3	Tamat SD Sederajat	4.214	4.677	8.891
4	SLTP Sederajat	4.004	3.913	7.917
5	SLTA Sederajat	4.408	1.874	6.282
6	DIPLOMA I/ II	1.104	281	1.385
7	AKADEMI/ DIPLOMA III	833	7.021	7.854
8	DIPLOMA IV / STRATA	1.703	1.900	3.603
9	STRATA II	179	150	329
10	STRATA III	61	47	108
JUMLAH		28.527	28.710	57.237

Sumber : Data Monografi Kelurahan Kelapa Dua Wetan 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat masih banyak penduduk di Kelurahan Kelapa Dua Wetan yang tidak atau belum bersekolah, yaitu berjumlah 12.919 penduduk. Dan sekitar 8.891 penduduk hanya tamatan/lulusan Sekolah Dasar. Namun dapat dilihat juga banyak juga dari penduduk di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, yang tamat/lulusan SLTA sederajat dan perguruan tinggi.

5. Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Berikut adalah data jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga berdasarkan data monografi 2021 Kelurahan Kelapa Dua Wetan:[83]

Tabel 3.7

Rukun Tetangga dan Rukun Warga

NO	RT	RW
1	8	1
2	14	2
3	9	3
4	12	4
5	8	5
6	9	6
7	8	7
8	16	8
9	18	9
10	6	10
11	14	11
12	12	12
JUMLAH	**134**	**12**

6. Sarana dan Prasarana

[83] Dokumentasi Data Monografi Kelurahan Kelapa Dua Wetan tahun 2021

Berikut Ini adalah Sarana dan Prasarana yang terdapat di Kelurahan Kelapa Dua Wetan :[84]

1) Sarana Olahraga

Adapun sarana olahraga yang ada di Kelurahan Kelapa Dua Wetan adalah sebagai berikut:

a. Lapangan Sepak Bola : 1 buah
b. Lapangan Bulutangkis : 17 buah
c. Lapangan Volley ball : 4 buah
d. LapanganTenis : 1 buah
e. Lapangan Basket : -
f. Lapangan Futsal : 4 buah

2) Sarana Kesehatan

a. Rumah Sakit : -
b. Rumah Bersalin / Bidan : 6buah
c. Puskesmas : 1buah
d. Pos Kesehatan : -
e. BKIA : 1 buah
f. Apotik : 5 buah
g. Poliklinik : 5 buah
h. Praktek Dokter : 4 buah

3) Sarana Ibadah

a. Mushola : 20 buah
b. Masjid : 25 buah
c. Gereja : 6 buah

4) Sarana Sosial

a. Penampungan Yatim Piatu : 2 buah
b. Rumah Jompo : -
c. Penampungan Orang Cacat : -
d. Rumah Penitipan Anak : -

[84] Dokumentasi Data Monografi Kelurahan Kelapa Dua Wetan tahun 2021

5) **Sarana Rekreasi**

a. Bioskop : -

b. Taman Hiburan : 1 buah

c. Panti Pijit : 4 buah

d. Rumah Bilyard : 2 buah

B. Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Kelapa Dua Wetan

Program Bantuan Sosial Tunai merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar. Program Bantuan sosial Tunai di Kelurahan Kelapa Dua Wetan dikelola oleh perangkat Kelurahan setempat dan pihak Bank DKI Jakarta sebagai penyalur bantuan tersebut.

Untuk penyaluran dana BST menggunakan ATM DKI yang telah didistribusikan oleh pihak DKI. Setiap bulan penerima bantuan mengambil bantuan melalui ATM DKI yang telah di ditribusikan, jumlah yang di terima sebesar 300 ribu rupiah.

Pada proses pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, sudah dilakukan sebanyak 4 tahap yaitu pada bulan Januari sampai bulan april dengan jumlah penerima sebanyak sekitar 9000 KPM (keluarga penerima manfaat), untuk tahap 5 dan 6 dilakukan pada bulan mei dan juni dengan jumlah penerima bantuan yang merupakan sisa dari tahap sebelumnya yang mengalami kegagalan penginputan data dalam proses pendistribusian dan penyaluran.

C. Krisis Ekonomi Warga Kelurahan Kelapa Dua Wetan

Pada masa pandemi COVID-19, dampak yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari adalah krisis ekonomi. Krisis ini mengakibatkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka. Krisis ekonomi sendiri bisa diakibat kan oleh banyak faktor,baik internal dan eksternal atau faktor-faktor non ekonomi,

seperti sosial, budaya ,kultur dan politik.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, didapatkan hasil bahwa selama masa pandemi warung-warung yang berada di lingkungan tempat tinggal masyarakat sangat sepi pembeli dan jarangnya pedagang keliling yang lewat. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa selama masa pandemi sebagian masyarakat mengalami kesulitan karena adanya aturan PSBB dan PPKM, sehingga mempengaruhi pekerjaan dan jumlah penghasilan. Selain itu peneliti juga menemukan bahwa selama masa pandemi ini ada beberapa masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), peralihan profesi, hal ini dibuktikan dengan pengakuan masyarakat setempat.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Padli selaku warga Kelurahan Kelapa Dua Wetan RT.11/ RW. 09, berikut hasil wawancaranya:

> *"Ya, sangat bepengaruh sekali untuk sopir angkot seperti saya. Sebelum ada Covid, kadang bisa dapat Rp.500.000/hari bahkan lebih. Semenjak ada pandemi jadi sepi, apalagi pas ada PSBB sama PPKM, angkot hampir tidak pada jalan itu selama sebulan lebih. Baru bisa jalan pas PSBB sama PPKM dicabut, itu juga penghasilan menurun, tidak seperti pas sebelum pandemi".*[85]

Tak hanya Bapak Padli saja yang mengatakan bahwa pandemi ini menimbulkan dampak yang begitu besar terhadap pekerjaan dan jumlah penghasilan. Ibu Isah selaku warga RT. 08/ RW. 11, yang merupakan seorang pedagang juga mengatakan hal demikian, berikut hasil wawancaranya:

"Penghasilan harian bisa sampai Rp.300.000/hari bahkan lebih, itu sudah bersih tidak kepotong modal lagi. Adanya pandemi ini sangat mempengaruhi penghasilan saya, tadinya warung saya ramai anak sekolah pada jajan, semenjak ada pandemi terus ada PSBB dan PPKM, sekolah diliburkan jadi sepi

[85] Hasil wawancara dengan Bapak Padli (Keluarga Penerima Manfaat) tanggal 12 September 2021 pukul 13.70

pembeli,".[86]

Sebagai seorang yang mempunyai pekerjaan utama sebagai tukang servis barang elektronik, Bapak Wilopo Heri Palawati warga RT.06/RW.02 pun mengatakan bahwa pandemic ini sangat berpengaruh terhadap pendapatannya, ia mengatakan bahwa:

> *"Untuk penghasilan saya tidak menentu karena serabutan. Kira-kira perhari bisa dapat Rp.100.000, kalo lagi ramai bisa dapat Rp.250.000. Semenjak ada pandemi ini pengaruh juga dengan penghasilan saya, karena banyak orang yang kesusahan ekonomi jadi pelanggan jadi sepi".*[87]

Kemudian Bapak Nahlan warga RT.04/RW.11, merupakan salah satu karyawan yang terkena PHK di PBPASI ,akibat dari adanya pengurangan karyawan pada masa pandemi ini, ia mengatakan bahwa:

> *"kalo saya saat ini sih gak bekerja karean dulu ada pengurangan karyawan di PBPASI, agak kesulitan sih ekonomi keluarga saya pas ada pandemi ini, karena habis kena PHK saya nganggur beberapu bulan sulit buat nyari pekerjaan baru, akhirnya saya buka usaha mie ayam aja di rumah pake modal hasil pesangon saya, lumanyan buat nambah-nambah penghasilan, tapi awal-awal masih sepi karena ada PSBB dan PPKM."* [88]

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pandemi ini sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi seluruh lapisan masyarakat,dimana mereka mengalami penurunan pendapatan. Akibatnya, masyarakat dilingkungan Kelurahan Kelapa Dua Wetan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, dikarenakan dengan adanya pandemi covid-19, pendapatan

---

[86] Hasil wawancara dengan Ibu Isah (Keluarga Penerima Manfaat) tanggal 12 September 2021 pukul 14.50

[87] Hasil wawancara dengan Bapak Wilopo Heri Palawati (Keluarga Penerima Manfaat) tanggal 14 September pukul 10.15

[88] Hasil wawancara dengan Bapak Nahlan (Keluarga Penerima Manfaat) tanggal 12 September 2021 pukul 15.25

masyarakat menjadi menurun bahkan terdapat masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya. Hal tersebut berpengaruh terhadap kondisi ekonomi seluruh lapisan masyarakat,terkhususnya bagi masyarakat yang tinggal dilingkungan Kelurahan Kelapa Dua Wetan.

D. Peran Pemerintah dalam Mengatasi Krisis Ekonomi

Dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak masyarakat yang merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar karena kehilangan mata pencahariannya dan mengalami penurunan pendapatan. Oleh karena itu,dibutuhkan peran aktif dari pemerintah guna membantu masyarakat agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar selama masa pandemi. Salah satu peran aktif dari pemerintah adalah Program Bantuan Sosial Tunai bagi DKI Jakarta.

Menurut Ibu Nia selaku PJLP (Pendamping Sosial) memberikan pendapat mengenai program bantuan social tunai untuk masyarakat, berikuthasil wawancaranya:

> *”Menurut saya, program tersebut sangat membantu ya, apalagi dimasa pandemi seperti ini banyak masyarakat yang kesusahan dari segi ekonominya”.*[89]

Bapak Padli yang bekerja sebagai supir angkot juga mengatakan bahwa selama pandemi, pemerintah berupaya untuk membantu rakyat dengan memberikan beberapa program bantuan. Berikut hasil wawancaranya :

> *“Ya, menurut saya sudah cukup membantu ya pemerintah, apalagi pas ada bantuan itu. Sembako sama BST saja yang saya tau”.*[90]

Selain itu, Ibu Isah yang berprofesi sebagai pedagang jajan anak mengatakanhal demikian :

> *“Menurut saya pemerintah sudah bagus, sudah cukup membantu, banyak*

[89] Hasil wawancara dengan Ibu Nia (Pendamping Sosial) tanggal 5 September 2021 pukul 10.70
[90] Hasil wawancara dengan Bapak Padli (Keluarga Penerima Manfaat) tanggal 12 Septembe 2021 pukul 13.70

bantuan-bantuan yang diberikan seperti subsidi UMKM, bansos sembako, sama ini BST. Saya hanya dapat sembako, UMKM, sama BST".[91]

Bapak Wilopo Heri Palawati pun mengatakan bahwa pandemic ini sangat berpengaruh terhadap pendapatannya, ia mengatakan bahwa:

"Kalau menurut saya pemerintah sudah berperan aktif dalam membantu masyarakat, apalagi kemarin banyak bantuan dana seperti bansos. Kemarin saya dapat bansos sembako tapi hanya setengah karena saya pindah rumah dan alamat, jadi saya tidak dapat lagi. Lalu bansos sembako diganti sama BST".[92]

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya pemerintah memang sudah berupaya dalam mensejahterakan masyarakat dan membantu perekonomian masyarakat di masa pandemi ini. Hal ini dibuktikan dengan selama masa pandemic ini masyarakat di lingkungan Kelurahan Kelapa Dua Wetan merasa pemerintah sudah berperan aktif dalam upaya membantu masyarakat melalui berbagai bantuan yang sudah diberikan.

Dalam paradigma Islam, pemerintah berkewajiban dalam mengentaskan kemiskinan pada daerah yang ia pimpin. Hal tersebut sebagaimanafirman Allah SWT dalam Q.S Al-Hadid ayat 25 sebagai berikut :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ
وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ
شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
قَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

[91] Hasil wawancara dengan Ibu Isah (Keluarga Penerima Manfaat) tanggal 12 Septembe 2021 pukul 14.50

[92] Hasil wawancara dengan Bapak Wilopo Heri Palawati (Keluarga Penerima Manfaat) tanggal 14 Septembe pukul 10.15

Artinya : *Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan* (Q.S Al-Hadid ayat 25).[93]

Pada surat Al-Hadid ayat 25 dapat dipahami bahwa pemerintah yang merupakan pemimpin berkewajiban untuk mensejahterakan negara/daerah yang ia pimpin, termasuk untuk memberi keadilan ekonomi secara amanah terhadap masyarakat yang membutuhkan agar terpenuhinya kebutuhan dasarnya. Hal tersebut juga dirasakan masyarakat yang berada dilingkungan Kelurahan Kelapa DuaWetan. Masyarakat yang sesuai dengan persyaratan dan kriteria pemerintah telah mendapatkan berbagaibantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup selama masa pandemi.

E. Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Kelapa Dua Wetan

Program bantuan sosial tunai memiliki tujuan untuk membantu setiap masyarakat yang kehilangan mata pencaharian di tengah masa pandemi dan mereka yang terkena dampak besar dari adanya pandemi covid-19. Suatu program dikatakan efektif apabila tujuan dari program tersebut dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efektivitas program diukur dengan menggunakan 3 indikator, yaitu :

1. Pencapaian Tujuan

Tujuan dari dilaksanakannya program ini adalah untuk membantu masyarakat selama masa pandemi Covid-19. Program ini diperuntukan bagi masyarakat yang rentan terkena dampak dari adanya pandemi.

Menurut Ibu Nia selaku PJLP, tujuan dari program bantuan social tunai untuk masyarakat adalah sebagai bantuan sosial pengganti. Berikut hasil wawancaranya:

[93]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah,*(Bandung : Diponegoro, 2011), hal 539

”BST sendiri sebenarnya merupakan bansos pengganti, dari bansos sembako tahun lalu (2020). Tujuannya sendiri untuk membantu masyarakat yang notabennya kurang mampu, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdamapak pandemi Covid-19. Seperti yang terkena PHK, karyawan yang dirumahkan, atau pedagang yang mengalami penurunan penghasilan selama pandemi ini”.[94]

Dengan adanya program bantuan sosial tunai, ada beberapaa syarat dan ketentuan dari pemerintah. Mengenai hal tersebut, Ibu Nia mengatakan:

”Ya itu tadi, orang-orang yang tidak mampu atau golongan menengah ke bawah, dan yang pasti juga bukan keluarga penerima bantuan PKH dan BPNT”.[95]

Mengenai kurun waktu, program ini telah berjalan selama 6 tahap pada bulan januari-juni, dan apakah penerima program bantuan social tunai telah memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta pembagian yang merata untuk masyarakat yang terdampak pandemi. Ibu Nia mengatakan:

”Sudah sesuai karena untuk Kelurahan Kelapa Dua Wetan sendiri, dari data yang kami sortir tidak ada yang ASN, Pensiunan,atau golongan orang yang bisa dikatakan mampu. Kalau menurut saya sudah cukup merata ya, karena dari target KPM yang sudah ditentukan, sudah hampir semua masyarakat di Kelurahan Kelapa Dua Wetan ini mendapatkan bantuan tersebut. Untuk kelapa dua wetan sendiri jumlah KPM mencapai 9.000 KPM (Keluarga Penerima, tahap-1 berjumlah 9.828, tahap-2 berjumlah 9.475, tahap-3 berjumlah 9.475, tahap-4 berjumlah 9.470, dan untuk tapah 5 dan 6 sisa dari KPM yang gagal atau tidak mendapat undangan pada tahap sebelumnya”.[96]

[94]Hasil wawancara dengan Ibu Nia
[95] Hasil wawancara dengan Ibu Nia
[96] Hasil wawancara dengan Ibu Nia

Tujuan dari program tersebuta dalah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di masa pandemi. Hal tersebut seperti pendapat Ibu Nia, beliau mengatakan :

”Menurutu saya, sudah cukup membantu karena dengan uang tersebut masyarakat sudah sedikit diringankan kebutuhan ekonominya”.[97]

Ada beberapa hal yang dilakukan Bapak Padli untuk memanfaatkan dana bantuan demi mencukupi kebutuhan keluarga, beliau mengatakan bahwa:

“Dibelikan sembako sama uang listrik. Ya dicukup-cukupin aja mbak, karena kebutuhan kita sebenarnya banyak”.[98]

Menurut Ibu Isah, dana bantuan dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Beliau mengatakan :

“Saya dapat tiga kali karena yang terakhir itu double, kalau uangnya saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari saja”.[99]

MenurutBapak Wilopo, bantuan dari program ini cukup membantu keadaan ekonominya. Beliau mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya bantuan ini sudah sangat membantu karena pada saat ini apa-apa mahal, pelanggan tida ada juga. Jadi uang tersebut sudah cukup membantu buat saya”.[100]

Sedangkan menurut Bapak Febri warga RT.14/RW.02, bantuan dari program ini lumanya membantu keadaan ekonominya namun beliau lebih lebih menyukai bansos sembako karena nilai harganya jau berbeda. Beliau mengatakan bahwa:

“menurut saya bantuan tersebut sudah lumayan lah, tapi dibandingkan

---

[97] Hasil wawancara dengan Ibu Nia (Pendamping Sosial) tanggal 5 September 2021 pukul 10.70

[98] Hasil wawancara dengan Bapak Padli (Keluarga Penerima Manfaat) tanggal 12 September 2021 pukul 13.70

[99] Hasil wawancara dengan Ibu Isah (Keluarga Penerima Manfaat) tanggal 12 September 2021 pukul 14.50

[100] Wawancara Bapak Wilopo Heri

dengan bansos sembako kemarin saya lebih suka yang sembako karena kalo dilihat dari segi harga dibandingkan dengan BST jauh mba, karena sembako kemarin itu banyak banget, ada beras dan kebutuhan pokok lainya."[101]

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan progam bantuan sosial tunai dilingkungan Kelurahan Kelapa Dua Wetan berdasarkan kurun waktu program ini telah terlaksana selama 6 tahap yaitu pada bulan Januari-Juni, dan sudah tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun pemerintah tentunya juga perlu meningkatkan kembali program tersebut, agar program bantuan bisa dilakukan sesuai visi besarnya dalam mengentaskan kemiskinan, maka harus dipastikan distribusi dan penyalurannya dilakukan secara tepat sasaran dan profesional. Hal tersebut sesuai dengan

2. Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagaimacam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi mengenai sebuah program yangakan dijalankan.

Bapak Padli mengetahui informasi mengenai program bantuan sosial tunai dari pihak perangkat kelurahan. Berikuthasil wawancaranya :

"Saya tahu dari pak RT, Pak Agus namanya. Beliau suka ngasih tahu kalo ada informasi dari kelurahan. Ya sudah, paling ya itu pak RT".[102]

Mengenai bantuan lain, proses pencairan dan hambatan pada saat pencairan dana, beliau mengatakan :

"Enggak, saya cuma dapet sembako sama BST saja, paling anak saya dapat KJP itu juga sering telat. Proses pencairan dapat undangan dari pemerintah, terus undangan buat mengambil ATM di SD 01. Saya ambil sendiri tidak diwakilin, dan tidak ada kendala gampang-gampang aja.

[101] Hasil wawancara dengan Bapak Febri (Keluarga Penerima Manfaat) tanggal 12 September 2021 pukul 12.55

[102] Hasil wawancara dengan Bapak Padli

Saya menerima Rp.300.000/ bulan, cuma tiga kali, yang terakhir di double".[103]

Selain itu, Ibu Isah dan Bapak Wilopo mengetahui informasi mengenai program bantuan sosial tunai dari Grup Rukun Tetangga. Keduanya mengatakan demikian :

"Saya tahu BST dari Grup RT, habis itu pak RT bagi-bagiin undanganya, sambil ngasih tau cara-cara prosesnya sama ngambilnya".[104]

Mengenai proses pencairan dana,Ibu Isah mengatakan :

"Saya kemarin pas mengambil ATM diwakilin anak saya pake surat kuasa, karena takut tidak paham untuk ngurus persyaratannya, alhamdulilah lancar gak di persulit sih, saya dapat uangnya Rp.300.000".

Sedangkan Bapak Wilopo mengatakan bahwa :

"Kalau kemarin saya proses pengambilan ATM saya urus sendiri".

Menurut Ibu Nia mengenai proses sosialiasi, proses penyaluran dana dan hambatanpada saatpenyaluran dana program, beliau mengatakan:

"Untuk proses penyalurannya :kalau untuk pendistribusian undangannya oleh pihak Bank dan Dinas Sosial membuat surat undangan dikirim ke pihak Kelurahan, lalu pihak kami (kelurahan) melakukan pensortiran, lalu kami kirim ke wilayah untuk dikirim ke RT dan RW, jadi KPM menerima undangan sesuai jadwal hari, tempat, dan jam. Kemudian untuk pendistribusian kartu ATMnya, pihak Bank DKI datang ke wilayah yang telah udah ditetapkan dalam surat undangan sesuai jadwal. Untuk di Kelurahan Kelapa Dua Wetan ditempatkan di SD terdekat, SD 06,01,02. Waktunya setiap sejam setengah sekali tiap season, diambil 20 orang setiap seasonnya. Mengenai kendala, tidak ada kendala atau hambatan, semua berjalan lancar,karena sebelum penyebaran undangan tersebut,

[103]Hasil Wawancara bapak Padli
[104] Hasil wawancara Ibu Isah dan Bapak Wilopo

pihak kelurahan dan perangkat setempat sudah melakukan sosialisasi baik dari mulut ke mulut maupun melalui media sosial seperti grup Whatsapp,dan asalkan KPM membawa surat udangan dan berkas yang diperlukan lengkap, seperti KTP asli, KK asli, dan bisa diwakilkan apabila penerima tidak dapat mengambil atau memproses ATM, dengan syarat yang mewakilkan harus membawa surat kuasa dari kelurahan atau dinas sosial. Pihak Bank DKI juga memudahkan apabila ada yang diwakilkan, tidak dipersulit".[105]

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai proses integrasi,dapat disimpulkan bahwasa pihak Kelurahan Kelapa Dua Wetan mensosialisasikan program bantuan tersebut kepada masyarakat. Pemberitahuan informasi tersebut mencakup mengenai bantuan apa, untuk siapa yang berhak menerima, serta proses dan lokasi pencairan dana bantuan. Sosialisasi tersebut dilakukan secara pribadi atau melalui media *chat group*, para penerima bantuan tersebut juga tidak mengalami kesulitan dan kendala apapun

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah ada perubahan yang terjadi ketika menerima bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nia mengenai aspek adaptasi, termasuk keefektifan dan kelanjutan program bantuan sosial tunai, beliau mengatakan:

"Menurut saya program ini masih belum efektif, karena banyak masyarakat yang mengeluhkan jumlah tersebut masih belum cukup untuk kebutuhan selama sebulan, bahkan tidak banyak dari masyarakat yang lebih memilih sembako ketimbang uang, karena jumlah atau nilai uang tersebut dirasa tidak cukup untuk membeli sembako, seperti tahun lalu. Karena setiap keluaraga pasti beda-beda kebutuhannya, ada yang sudah merasa cukup ada yang belum.Ya selama masih pandemi saya rasa BST

[105] Hasil wawancara Ibu Nia

perlu dilanjutkan, sampai kiranya perekonomian dan keadaan normal kembali".

Mengenai keberlanjutan program bantuan sosial tunai, Bapak Padli mengatakan bahwa:

"Tanggapan saya kalau bisa diperpanjang selama masih ada pandemi atau covid".

Hal serupa juga dikatakan Bapak Wilopo, beliau mengatakan bahwa:

"Kalau harapan saya agar BST terus berlanjut sampe perekonomian normal dan pandemi selesai".[106]

Sebagai salah satu penerima bantuan, Ibu Isah mengatakanbahwa merasa terbantu semenjakadaprogramini, berikut hasil wawancaranya:

"Kalau menurut saya dana tersebut sangat membantu, tapi kalau boleh memilih mendingan sembako saja, karena lebih banyak. Karena uang Rp.300.000 buat saya belum cukup untuk membeli sembako seperti kemarin. Ya kalau bisa BST di perpanjang saja selama masih ada covid".[107]

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program bantuan sosial tunai (BST) menimbulkan hal baru dalam kehidupan bermasyarakat diKelurahan Kelapa Dua Wetan. Bantuan ini membuat masyarakat agar lebih bias untuk hidup hemat dan tidak konsumtif. Pelaksanaan program bantuan social tunai di Kelurahan Kelapa Dua Wetan ini juga tidak membuat masyarakat menjadi pasif atau hanya mengandalkan uang bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun masyarakat dilingkungan Kelurahan Kelapa Dua Wetan masih terus mencari pendapatan guna dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di masapandemi covid-19. Dengan adanya program bantuan sosial tunai (BST) diharapkan dapat menimbulkan hal baru dalam menghadapi pandemi bagi masyarakat di Kelurahan

[106] Hasil Wawancara Bapak Wilopo
[107] Hasil Wawancara Ibu Isah

Kelapa dua wetan.

F. Analisis Penulis

1. Analisis Krisi Ekonomi Warga Kelurahan Kelapa Dua Wetan

   Pada masa pandemi COVID-19, dampak yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari adalah krisis ekonomi. Krisis ini mengakibatkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka. Krisis ekonomi sendiri bisa diakibat kan oleh banyak faktor,baik internal dan eksternal atau faktor-faktor non ekonomi, seperti sosial, budaya ,kultur dan politik.

   Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, didapatkan hasil bahwa selama masa pandemi warung-warung yang berada di lingkungan tempat tinggal masyarakat sangat sepi pembeli dan jarangnya pedagang keliling yang lewat. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa selama masa pandemi sebagian masyarakat mengalami kesulitan karena adanya aturan PSBB dan PPKM, sehingga mempengaruhi pekerjaan dan jumlah penghasilan. Selain itu peneliti juga menemukan bahwa selama masa pandemi ini ada beberapa masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), peralihan profesi.

   Jika kita kaitkan dengan teori krisis, pandemi menjadi salah satu factor penyebab terjadinya krisis ekonomi karena dengan adanya pandemi ini, banyak sekali masyarakat yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan selama pandemi ini..

2. Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Krisis

   Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat (1): “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, sepiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fusngsionalnya.[108] Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa, aspek penting dalam kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan material, karena apabila aspek tersebut tidak dapat terpenuhi, maka sulitnya aspek-asep lain untuk terpenuhi. Dapat dilihat pada bab sebelumnya, pandemi menyebabkan adanya krisis ekonomi yang menyebabkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu dibutuhkan peran aktif pemerintah guna membantu masyarakat pada masa pandemi ini. Oleh karena itu

[108] Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat (1)

untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan agara masyarakat terjamin kebutuhannya, maka pemerintah memberikan berbagai sekema bantuan untuk masyarakt terdampak pandemi Covid-19. Dalam bab sebelumnya tentang pengentasan kemiskinan dalam prespektif Islam, menurut Quraisy Shihab, secara garis besar usaha pengentasan kemiskinan dalam islam dapat dibagi menjadi tiga yaitu, kewajiban individu, kewajiban kelompok/ masyarakat dan kewajiban pemerintah, jadi dapat disimpulkan bahwa, dalam paradigma Islam Pemerintah berkewajiban mengetas kemiskinan pada daerah yang ia pimpin sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hadid Ayat 25 sebagai berikut :

ô⍰s)s9 $uù=y⍰ö⍰r& $oYnß⍰â⍰ ÏM»ZÉi⍰t7ø9$$Î/
$uZø9t“Rr&ur ÞOßgètB |=»tÅ3ø9$# ⍰c#u”⍰ÏJø9$#ur
tPq)u⍰Ï9 â¨¨Y9$# ÅÝ¡É)ø9$$Î/ ($uZø9t“Rr&ur y⍰⍰Ïptø:$#
Ïm⍰Ïù Ó¨ù't/ Ó⍰⍰Ïx© ßìÏÿ»oYtBur Ä¨$¨Z=Ï9 zNn÷èu⍰Ï9ur
ª!$# `tB ¼çnç⍰ÝÇZt⍰ ¼ã&sß⍰â⍰ur Í=ø⍰tóø9$$Î/ 4 ¨bÎ) ©!#
;“Èqs% Ö“⍰Ì“tã ÇÏÎÈ

”Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.”

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah merupakan pemimpin yang memangku amanah untuk mensejahterkan negara yang ia pimpin, termasuk penegakan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Komitmen Islam yang besar terhadap persaudaraan dan keadilan menuntut pada terpenuhinya kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan.[109]

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi serta dokumentasi mengenai data penerima bantuan, masyarakat di Kelurahan Kelapa Dua Wetan telah menerima berbagai bantuan yang telah diberikan pemerintah selama masa pandemi ini, salah satunya adalah

[109] Kartiawati, “*Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta (PKH) Kampung Bonglai kec. Banjit Kab. Way Kanan)” Skripsi*, IAIN Raden Lampung, 2017, hal 41

program Bantuan Sosial Tunai, yang diberikan kepada masyarakat rentan terdampak pandemi Covid-19.

3. Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Kelapa Dua Wetan

Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dnengan kata lain sasaran tercapai kareana adanya proses kegiatan.[110] Suatu program dikatakan efektif apabila dapat diukur sesuai indikator atau ukuran dari efektivitas. Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana efektivitas pada Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, maka penulis menggunakan teori Richard M.Streers, dimana ukurana dalam efektivitasnya sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

   Pencapaian tujuan adalah seluruh upaya dari pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai bentuk sebuah proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yakni kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit dari sebuah program.[111]

   Berdasarkan hasil Penelitian pada kurun waktu program terasebut telah berjalan selama 6 tahap dari bulan Januari sampai Juni, bantuan sosial ini memang sudah sangat membantu masyarakat tetapi dari segi nominal bantuan ini masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama satu bulan. Dan berdasarkan sasaran bantuan ini telah tepat sasaran dan sesuai kriteria yang telah ditentukan Pemerintah DKI Jakarta.

2. Integrasi

   Integrasi berkaitan dengan Proses sosialisasi. Yang mana hal ini adalah sebuah pengukuran dari sebuah organisasi apakah sudah mampu mengadakan sosialisasi dan menjalin komunikasi dengan organisasi lainnya atau belum.[112]

   Berdasarkan hasil penelitian, proses sosialisasi dari Program ini telah tersampaikan dengan baik, sosialisasi program yang dilakukan di Kelurahan Kelapa Dua Wetan adalah melalui sosialisasi perangkat desa dan juga melalui media sosial seperti grup chat *Whatsapp*.

3. Adaptasi

   Berdasarkan hasil penelitian, dengan adanya program Bantuan Sosial Tunai (BST) menimbulkan hal baru dalam kehidupan

---

[110] Harbani Pasolong, Teori administrasi publik (Bandung :Alfabeta, 2007), hal 4

[111] Cindy Vatika Sari , "*Efektivitas Pelaksanaan Program Mappadeceng Dinas Sosial Kabupaten Soppeng",* Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar 2021, hal 14-15

[112] *Ibid , hal 14-15*

bermasyarakat di Kelurahan Kelapa Dua Wetan. Bantuan ini membuat masyarakat agar lebih hemat dan tidak konsumtif. Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Kelapa Dua Wetan ini juga tidak membuat masyarakat cenderung pasif atau hanya mengandalkan uang bantuan saja.

G. Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Prespektif Ekonomi Islam

Kesejahteraan dengan menerapkan sistem ekonomi islam adalah sistem yang menganut dan memasukan nilai-nilai, agama, norma, dan ajaran islam (variabel keimanan) sebagai unsur yang frundamental dalam mencapai kesejahteraan. Efektivitas program bantuan sosial Tunai (BST) dalam membantu perekonomian masyarakat terdampak Covid-19 di Kelurahan Kelapa Dua Wetan menurut prespektif Ekonomi Islam dapat dilihat dari nilai-nilai dasar dalam Ekonomi Islam, yaitu :

1. Keadilan

   Keadilan dalam hal ini adalah menjujung tinggi nilai kebenaran, kejujuran dan konsisten pada kebenaran.[113]

* ¨bÎ ©!$# ã□ãBù't□ ÉAô□yèø9$$Î/ Ç`»|¡ômM}$#ur Ç□!$tG□Î)ur “Ï□ 4□n1ö□à)ø9$# 4□sSZt□ur Ç`tã Ïä!$t±ósxÿø9$# Ì□xYßJø9$#ur ÄÓøöt7ø9$#ur 4 öNä3ÝàÏèt□ öNà6¯=yès9 □crã□©.x□s? ÇÒÉÈ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.[114]

---

[113] Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2013, h. 63.

[114] Departemen Agama RI, Op.Cit, hal.385

Pada surat An-Nahl ayat 90 dapat dipahami bahwa Allah SWT sangat menekankan kita selaku umat manusia harus berprilaku adil, termasuk adil dalam memberikan kesejahteraan kepada sesama, termasuk berlaku adil pemerintah kepada rakyatnya dalam memenuhi kesejahteraan rakyat. Mengenai efektivitas program Bantuan Sosial Tunai dalam membantu perekonomian masyarakat terdampak Pandemi Covid-19 di Kelurahan Kelapa Dua Wetan termasuk sudah tepat sasaran dalam pemberian program tersebut, dimana bantuan tersebut telah diberikan kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta, yaitu untuk masyarakat kurang mampu dan rentan terdampak pandemi Covid-19.

2. Tanggung Jawab

Setiap pelaku ekonomi memliki tanggung jawab untuk berprilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.[115]

@ä ¤§øÿtR $yJÎ ôMt6|¡x. îpoY Ïdu ÇÌÑÈ

"tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya."[116]

Dalam surat Al-Muddatsir ayat 38, dapat dipahami bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab, terlebih lagi kepada para pemimpin yang memiliki tanggung jawab kepada rakyatnya yang mengalami kesusahan. Mengenai efektivitas program Bantuan Sosial Tunai dalam membantu perekonomian masyarakat terdampak Pandemi Covid-19 di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Seluruh pihak baik masyarakat maupun pemerintah telah bertanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan dari program tersebut dan dalam hal ini seluruh pihak baik masyarakat dan

[115] Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2013, h. 63.

[116] Departemen Agama RI, hal.575

pemerintah telah amanah dalam menjalakan tugasnya, karena program Bantuan Sosial Tunai sudah diberikan kepada orang yang tepat, tepat waktu, tepat guna serta tepat jumlah. Jadi, indikator tanggung jawab dalam efektivitas program Bantuan Sosial Tunai dalam membantu perekonomian masyarakat terdampak Pandemi Covid-19, telah terealisasi dengan baik.

3. *Tafakul* (Jaminan Sosial)

Adanya jaminan sosial dimasyarakatkan akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.[117] Setiap Individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin setiap warga negara, dalam kebutuhannya sesuai dengan prinsip *"hak untuk hidup".*[118]

|·÷u ø9ur úïÏ%©!$# öq9 (#qä.ts? ô`ÏB OÎgÏÿù=yz Zp Íh è $¯ÿ»yèÅÊ
(#qèù%s{ öNÎgø n=tæ (#qà)Gu ù=sù ©!$# #qä9qà)u ø9ur Zwöqs%
#´ Ï y ÇÒÈ

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar."[119]

---

[117] Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2013, h. 63.

[118] Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid I, hal.9

[119] Departemen Agama RI, hal.78

Dalam An-Nisa ayat 9, dapat dipahami bahwa Islam tidak memperbolehkan terhadap seorang muslim membiarkan muslim lainya dalam keadaan kelaparan/ kekurangan. Adanya jaminan sosial yang diberikan pemerintah hauslah menyeluruh demi terciptanya hubungan baik antar individu, masyarakat dan pemerintah. Progam Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada masyarakat DKI Jakarta yang kurang mampu dan rentan terdampak pandemi Covid-19, bantuan ini bertujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar pada masa pandemi, bantuan ini mendorong terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah dan masyaraka, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan dalam hubungan horizontal ini secara seimbang.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa efektivitas program Bantuan Sosial Tunai dalam membantu perekonomian masyarakat terdampak pandemi Covid-19, telah menerapakan nilai-nilai dasar Ekonimi Islam, dilihat dari segi tanggung jawab pada pelaksanaan program tersebut, semua pihak baik masyarakat dan pemerintah telah menjalankan progam tersebut dengan baik. Dan dari prinsip keadilan pada program ini telah terlaksana dengan baik dan adil, namun perlu adanya peningkatan lebih lanjut tentang program tersebut, agar masyarakat terjamin dari segi jaminan sosialnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan, Penjelasan yang telah peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan mengenai hasil penelitian mengenai Efektivitas Program Bantuan Sosial Dalam Membantu Perekonomian Masyarakata Terdampak Pandemi Covid-19 di Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, tepatnya pada masa pandemi. Maka peneliti menarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. **Krisis Ekonomi Warga Kelurahan Kelapa Dua Wetan**

   Selama masa pandemi Covi-19 ini, masyarakat di Kelurahan Kelapa Dua Wetan mengalami krisi ekonomi dan penurunan pendapatan, akibat dari adanya pandemi dan kebijakan pemerintah seperti PSBB dan PPKM. Banyaknya masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan juga kehilangan pekerjaan atau PHK, bahkan banyaknya pedagang dan warung-warung yang terpaksa harus tutup karena sepi pembeli dan adanya peraturan pembatasan interaksi tersebut.

2. **Peran Pemerintah dalam Mengatasi Krisis**

   Krisi yang terjadi di masyarakat khususnya DKI Jakarta ini pun tak luput dari perhatian pemerintah setempat, Sehingga pemerintah berupaya aktif untuk membantu masyarakat agar tetap dapat memenuhui kebutuhan dasar. Oleh sebab itu, pemerintah mengambil langkah dengan mengadakan berbagai macam program bantuan sosial, seperti Progam Bantuan Sosial Tunai, agar masyarakat dapat terbantu dan terpenuhi kebutuhan dasarnya.

   Dari hasil penelitia dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah cukup membantu dan berperan aktif dalam membantu perekonomian

masyarakat di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya program-program seperti Bansos sembako dan Bantuan Sosial Tunai.

3. Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Kelapa Dua Wetan

1) Pencapaian Tujuan

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan, dapat disimpulkan bahwa dari aspek kurun waktu, pemberian bantuan sosial ini sudah membantu masyarakat untuk menjaga daya belinya, namunmemang dari segi nominal tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama satu bulan penuh, lalu dari aspek sasaran, pemberian Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Kelapa Dua Wetan sudah tepat sasaran, dimana bantuan inidiberikan kepada mereka yang telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementrian Sosial yakni untuk mereka yangkehilangan mata pencaharian selama masa pandemic serta bagi mereka yang rentan terdampak pandemi ini.

2) Intregrasi

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pihak RT dan RW sudah melakukan proses ientgrasi atau sosialisasi. Dimana pihak RT dan RW melakukan sosialisasi secara pribadi dan melalui media social yakni *WhatsApp Group* RT. Bentuk sosialisai yang diberikan adalah informasi mengenai tujuan bantuan sosial, kriteri penerima atau sasarannya serta alur dan syarat administrasi dalam pencairan dana bantuan sosial tunai ini.selain itu, pemberian bantuan sosial di lingkungan ini juga selalu tepat nominalnya, dalam arti tidak ada pemangkasan secara sepihak dari pihak-pihak terkait.

3) **Adaptasi**

Berdasrakan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat mengenai pelaksaan program bantuan sosial tunai ini adalah, masyarakat harus bisa menyisihkan waktu satu hari selama sebulan untuk mengambil dana bantuan, serta masyarakat harus terbiasa untuk menerapkan protocol kesehatan yang telah dianjurkan. Bantuan sosial tunai ini juga tidak membuat masyarakat menjadi pasif atauhanya mengharap dan mengandalkan uang bantuan, namun masyarakat tetap harus berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

4. Program Bnatuan Sosial Tunai (BST) Menurut Prespektif Ekonomi Islam

Mengenai efektivitas program Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam membantu perekonomian masyarakat terdampak Pandemi Covid-19 di Kelurahan Kelapa Dua Wetan menurut prespektif Ekonimi Islam, dapat dilihat dari nilai-nilai dasar berikut:

1. Keadilan
2. Tanggung Jawab
3. *Tafakul* (Jaminan Sosial)

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program Bantuan Sosial Tunai dalam membantu perekonomian masyarakat terdampak pandemi Covid-19, telah menerapakan nilai-nilai dasar Ekonimi Islam, dilihat dari segi tanggung jawab pada pelaksanaan program tersebut, semua pihak baik masyarakat dan pemerintah telah menjalankan progam tersebut dengan baik. Dan dari prinsip keadilan pada program ini telah terlaksana dengan baik dan adil, namun perlu adanya peningkatan lebih lanjut tentang program tersebut, agar masyarakat terjamin dari segi jaminan sosialnya.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Masyarakat dapat terus menggunakan bantuan dengan adil dan sesuai dengan tujuan dari adanya program tersebut. Dan pemerinta terus berperan aktif dalam membantu dan mensejahterakan masyarakat.
2. Penelitian Selanjutnya, perlu diteliti efektivitas beberapa program lainnya yang telah di implementasikan pemerintah, sehingga dapat diketahui program mana sajakah yang efektif dalam membantu dan mensejahterakan masyarakat terdampak pandemi di Indonesia.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini peneliti buat. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca masih dalam kategori jauh dalam kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan.oleh karena itu peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi kekurangan yang ada. Untuk yang terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. Agar karya ilmiah yang sederhana ini dapat bermanfaat, khususya bagi pribadi peneliti dan umumnya semua pembaca sekaligus pemerhati ekononomi islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Saebani, Beni *"Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi",* Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Anggoro,Toha, *Materi Pokok Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.

Bagir, Muhammad, *Kemiskinan dan keterbelakangan di Negara-Negara Muslim,*Bandung :Mizan, 1985.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah,* Bandung: Diponegoro, 2011.

Fathoni, Abdurrahmat "*Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi"*Jakarta : Rineka Cipta, 2010.

Harbani, Pasolong, *Teori Administrasi Publik,* Bandung: Alfabeta, 2007.

Huda, Nurul, *Ekonomi Pembangunan Islam,* Jakarta : Kencana, 2017.

Kountur, Rony, *Metode Penelitian Untuk Penulis Skripsi dan Tesis, Edisi Revisi,* Jakarta: PPM, 2007.

Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005),

Michael P. Todaro dan Sthepan C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan,* (Jakarta : Erlangga, 2003.

Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah,* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012)

AzhariAkmal Tarigan, *TafsirAyat-Ayat Ekonomi,* (Medan: FEBIUIN-SU Press, 2016)

Sugiyono,*"Metode Penelitian, Kuantitatif,Kualitatif, Dan R&D"*,Bandung: CV ALFABETA,2019.

Suryabarata, Sunardi, *Metode Penelitian,* Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Sulkan Yasin dan Sumarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru* (Surabaya : Mekar, 2008), hal.132

Tambunan, *Perekonomian Indonesia,* Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.

Tim FEBI UIN Walisongo Semarang, *Panduan Penulisan Skripsi*, semarang: 2018.

Qardhawi, 2005 dalam Nurul Huda dkk.,*Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015)

Zuriah, Nurul,*Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*,Jakarta:Bumi Aksara, 2006.

SKRIPSI

Kartiawati, "*Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta (PKH) Kampung Bonglai kec. Banjit Kab. Way Kanan)" Skripsi*, IAIN Raden Lampung, 2017.

Vatika Sari , Cindy , "*Efektivitas Pelaksanaan Program Mappadeceng Dinas Sosial Kabupaten Soppeng",* Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar 2021.

JURNAL

Anggia Valerisha dan Marshell Adi Putra, *Pandemi Global COVID-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital?*, jurnal penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNPAR 2020

Fatkhul Khoiriyah, dkk, *Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro,* Jurnal penelitian Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Spirit Publik Volume 15

Meilinda Triana Pangaribuan dan Adis Imam Munandar, *Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi Covid-19*, Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia, Volume 14, Nomor 1, Januari 2021, hal 2

Muheramtohadi S (2018), *Aktualisasi Ekonomi Islam dalam Menurunkan Tingkat Ketimpangan di Indonesia,* Bisei : Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam, hal. 21,http://ejotnal.unhasy.ac.id/index.php/bisei/article/view/283.

Melati dan Zulkarnaini, *"EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN PASIR PENGARAIAN"* Journal Publicuho Volume 4, No 1 (February-April), (2021)

Rulan Ahmad, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin : Pendekatan Modal Manusia (Studi Layanan Publik tantang Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang Diselenggaraakan oleh BPM-KB dan Posko 100 di Kota Surabaya),* Jurnal Administrasi Publik Vol. 10, No.2 (Desember 2012), hal. 12

Tulus T. H Muhammad Rizki, *"Dampak Program Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Tengah Pandemi COVID-19",* (Jurnal Good Governance : Vol.17 No.2, September 2021), hal.128

Qorib,ahmad,*PenerapanMaslahahMursalahdalamEkonomiIslam*,(JournalAnalyticaIslamica:Vol.5,No.I,2016)

WEB

https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/virus-corona-jadi-pandemi-global-apa-sih-pengertian-pandemi-3854/diakses 5 Oktober 2021 pukul 01.28 WIB

https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/493/dampak-covid-19--pengangguran-dki-jakarta-tembus-dua-digit.html , (diakses pada, 10 Oktober 2021, pukul 20.00 WIB)

https://money.kompas.com/read/2021/03/02/161627926/satu-tahun-pandemi-jumlah-pengangguran-nyaris-10-juta-angka-kemiskinan-tembus?page=all#page2

Mike Nafisah, *Cek informasi Bantuan Sosial Tunai Jakarta di Sini*, https://smartcity.jakarta.go.id/blog/637/cek-informasi-bantuan-sosial-tunai-jakarta-di-sini 11 Oktober 2021, Pukul 20.00 WIB.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENDAMPING SOSIAL

BANTUAN SOSIAL TUNAI

Wawancara dengan Pendamping Sosial

Nama : NIA

Pekerjaan / jabatan : PJLP (Pendamping Sosial)

1. Apakah Tujaan dari Program Bantuan Sosial Tunai?
2. Menurut Anda apakah Program Bantuan Sosial Tunai sudah merata untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19?
3. Apakah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai telah memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah ?
4. Bagaimana kriteria atau syarat yang diperlukan?
5. Apakah menurut anda, dengan adanya program tersebut masyarakat menjadi terbantu dan terjamin baik kesejahteraan maupun perekonomiannya di masa pandemi ini?
6. Bagaimana proses dari penyaluran dana Program tersebut?
7. Adakah kendala atau hambatan dari proses penyalurannya?
8. Bagaimana tanggapan anda tentang Program tersebut?
9. Apakah menurut anda program tersebut sudah efektif dalam membantu masyarakat terdampak pandemic COVID-19?
10. Apakah BST perlu dilanjutkan?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BANTUAN SOSIAL TUNAI

Identitas Responden

NAMA :

USIA :

ALAMAT :

1. Apakah Bapak /Ibu saat ini bekerja ?
2. Apa lapangan pekerjaan utama dari Bapak/Ibu?
3. Apakah Bapak/Ibu memiliki lapangan pekerjaan lain?
4. Berapa penghasilan Bapak/Ibu dalam Sebulan ?
5. Apakah dengan adanya pandemic COVID-19 ini mempengaruhi pekerjaan dan jumlah penghasilan yang Bapak/Ibu dapatkan ?
6. Apakah pemerintah telah berperan aktif dalam membantu atau meringankan perekonomian keluarga Bapak/Ibu selama masa pandemi ini?
7. Apa saja program yang telah diberikan pemerintah untuk membantu atau meringankan perekonomian keluarga Bapak/Ibu selama masa pandemi ?
8. Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui tentang BST?
9. Apakah perangkat atau pihak kelurahan setempat telah memberikan informasi yang jelas dan tepat tentang BST?
10. Bagaimana cara Bapak/Ibu memproses pencairan dana tersebut?
11. Apakah terdapat kendala dalam prosesnya?
12. Berapa jumlah uang atau dana yang Bapak/Ibu dapatkan?
13. Berapa kali Bapak/Ibu mendapatkan dana tersebut?
14. Apakah setiap bulan Bapak/Ibu mendapatkan dana yang tepat atau sesuai?
15. Bagaimana Bapak/Ibu menggunakan atau memanfaatkan dana tersebut?
16. Apakah dana tersebut telah mencukupi kebutuhan keluargaBapak/Ibu ?
17. Bagaimana tanggapan atau harapan Bapak/Ibu tentang program BST ini?

Lampiran 2

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Keluarga Penerima Manfaat

Wawancara Dengan PJIP (Pendamping Sosial)

Lampiran 3

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : 1567/Un.10.5/D1/PG.00.00/05/2021 05 Mei 2021
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Pra Riset / Penelitian

Kedada Yth :
Kepala Kelurahan Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi unuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin pra riset kepada :

Nama	:	NURIYA ULFI
Nim	:	1405026146
Semester	:	XIV
Jurusan / Prodi	:	S.1 Ekonomi Islam
Alamat	:	Gg. Batol 2, Rt. 014/ Rw. 002 No. 30D, Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur
Tujuan Penelitian	:	Mencari data untuk penyusunan Skripsi
Judul Skripsi	:	EFEKTIFITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM MEMBANTU PEREKONOMIAN MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI COVID19 MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Kelurahan Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur)
Waktu Penelitian	:	3 - 30 Mei 2021
Lokasi Penelitian	:	Kelurahan Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur

Demikian surat permohonan pra riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

FATONIH

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuriya Ulfi

Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 11 juni 1996

Alamat : Gg.Batol 2, Rt.06/RW.02 Ciracas Jakarta Timur

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Nama Orang Tua

Ayah : Nastangin

Ibu : Suliyah

Riwayat Pendidikan:

1. SD N KDW 03 PAGI 2008
2. SMP N 210 Jakarta 2011
3. MA N Kalibeber Wonosobo 2014

Demikian riwayat hidup ini di buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Desember 2021

Penulis

Nuriya Ulfi

1405026146